



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017**

PUSAT PERUMUSAN STANDAR

**BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2018**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Merujuk Renstra Pusat Perumusan Standar (PPS) tahun 2015-2019, maka untuk mewujudkan sasaran: tersedianya RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengembangan standar, maka PPS menetapkan 5 (lima) kegiatan utama yang terdiri dari:

1. Perumusan kebijakan pengembangan standar
2. Pengendalian proses perumusan SNI hingga RASNI siap ditetapkan
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia Perumusan SNI
4. Peningkatan Kinerja Komtek/Sub Komtek
5. Fasilitasi Perumusan SNI dan Kaji Ulang SNI

Secara umum, kinerja unit PPS di tahun 2017 telah menunjukkan hasil yang memuaskan karena telah mampu memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2017 dari Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PPS dalam Renstra PPS tahun 2015-2019, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2017 Pusat Perumusan Standar. Prosentase tingkat capaian yang diraih pada tahun 2017 adalah:

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realiasi	Capaian
Customer Perspectives					
1) Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1. Pertumbuhan SNI yang siap diterapkan oleh industri / organisasi	SNI	300	349	N/A
	2. Pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk unggulan nasional	SNI	100	76	N/A
	3. Pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk yang beredar di pasar retail	SNI	100	114	N/A
Internal Process Perspectives					
2) Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4. Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	Rekomendasi	6	6	100 %
	5. Jumlah SNI yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan regulasi, produk unggulan nasional,	SNI	500	539	107,8%

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realiasi	Capaian
	produk retail dalam negeri.				
3) Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional	6. Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	Rekomendasi	36	35	97,22 %
	7. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)	Rekomendasi	500	1043	208,6%
	8. Jumlah rancangan PERKA BSN terkait pengembangan SNI	rancangan	2	6	300%
4) Terwujudnya SNI yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan PERKA BSN	9. Jumlah SNI yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan PERKA BSN	SNI	500	539	107,8 %
	10. Jumlah sekretariat Komtek Perumusan SNI yang dikelola BSN	Sekretariat	36	34	94,44%
5) Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar	11. Jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	Orang	600	1061	176,8%
6) Meningkatnya kualitas Komtek/Subkomtek perumusan standar	12. Jumlah Komtek/Subkomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja	Komtek / Subkomtek	60	24	40%
	13. Persentase Komtek/Subkomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya	%	100%	100%	100%
7) Terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI	14. Jumlah SNI yang dikaji ulang	SNI	100	656	656%
	15. Jumlah fasilitasi perumusan RSNI	RSNI	100	100	100%
	16. Jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI	SNI	30	51	170%

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realiasi	Capaian
	yang digunakan sebagai RSNI				
8) Terwujudnya pengembangan SNI yang koheren dengan perkembangan standar internasional	17. Jumlah dokumen rekomendasi kertas posisi Indonesia terkait harmonisasi standar dalam forum kerjasama standarisasi regional/multilateral	Dokumen	40	49	122%
	18. Persentase tanggapan Indonesia dalam forum pengembang standar internasional	%	80	114	142%
	19. Persentase fasilitasi perumusan standar yang mengadopsi publikasi dari SDO	%	100	100	100%
Learning and Growth Perspectives					
9) Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PPS yang profesional.	20. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PPS yang meningkat kompetensinya	%	100%	100%	100%
	21. Realisasi anggaran PPS	%	≥ 95%	97,01%	102%
	22. Persentase pencapaian kinerja PPS	%	90%	77,27%	85%
	23. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	%	100%	100%	100%
	24. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	%	100%	100%	100%
	25. Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi unit PPS	%	75%	100%	133%

Sementara itu terkait pagu anggaran PPS tahun 2017 dan realisasinya, maka PPS mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 7.935.048.000, untuk membiayai 5 (lima) kegiatan utama yang ada dimana hasil capaian penyerapan anggaran pada tahun 2017 adalah sebesar 97,01 % (Rp. 7.698.059.393).

KATA PENGANTAR

Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, maka laporan ini disusun oleh Pusat Perumusan Standar (PPS) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait, khususnya kepada lembaga pembina Badan Standardisasi Nasional yang merupakan instansi induk dari PPS.

Tak lupa kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas hidayah dan tuntunan yang telah diberikan kepada kami beserta seluruh staf di lingkungan PPS, sehingga pencapaian kinerja unit kerja PPS tahun 2017 dan penyusunan laporan ini dapat terwujud dengan baik.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan PPS sepanjang tahun 2017 pada umumnya dan dalam penyusunan laporan ini, masih jauh dari sempurna sebagaimana diharapkan oleh banyak pihak. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan perbaikan dan kritik yang membangun untuk tercapainya hasil yang lebih sempurna di waktu yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami bahwa laporan ini akan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi para pembaca dan pengguna dokumen ini dalam penyediaan informasi yang terkait dengan kegiatan pengembangan SNI.

Jakarta, 25 Januari 2018
Plt. Kepala Pusat Perumusan Standar



Konny Sagala
NIP 19700304 199503 2 001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif.....	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Bab I Pendahuluan.....	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Maksud Dan Tujuan.....	1
I.4 Sumber Daya Manusia	4
I.5 Peran Strategis	5
Bab II Perencanaan Kinerja.....	6
II.1 Perencanaan Strategis	6
II.1.1 Visi Dan Misi.....	6
II.1.2 Tujuan Dan Sasaran.....	6
II.2 Perjanjian Kinerja.....	8
Bab III Akuntabilitas Kinerja	13
III.1 Capaian Kinerja	13
Sasaran 1 Meningkatnya Penerapan Sni Oleh Pemangku Kepentingan	17
1. Indikator Kinerja: Pertumbuhan Sni Yang Siap Diterapkan Oleh Industri/Organisasi	17
2. Indikator Kinerja: Pertumbuhan Jumlah Sni Yang Siap Mendukung Produk Unggulan Nasional	18
3.Indikator Kinerja: Pertumbuhan Jumlah Sni Yang Siap Mendukung Produk Yang Beredar Di Pasar Retail	19
Sasaran 2 Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Pengembangan Sni	21

4. Indikator Kinerja: Jumlah Rekomendasi Terkait Komite Teknis Perumusan Sni...	21
5. Indikator Kinerja: Jumlah Rsn Yang Diusulkan Untuk Ditetapkan Dalam Memenuhi Kebutuhan Regulasi, Produk Unggulan Nasional, Dan Produk Retail Dalam Negeri	22
Sasaran 3 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Sni Yang Sesuai Kebutuhan Nasional.....	22
6.Indikator Kinerja: Jumlah Rekomendasi Terkait Komite Teknis Perumusan Sni	23
7.Indikator Kinerja: Jumlah Rekomendasi Persetujuan Usulan Program Nasional Perumusan Standar (Pnps).....	24
8.Indikator Kinerja: Jumlah Rancangan Perka Bsn Terkait Pengembangan Sni	26
Sasaran 4 Terwujudnya Sni Yang Ditetapkan Telah Memenuhi Ketentuan Perka Bsn	27
9.Indikator Kinerja: Jumlah Sni Yang Ditetapkan Telah Memenuhi Ketentuan Perka Bsn	27
10.Indikator Kinerja: Jumlah Sekretariat Komtek Perumusan Sni Yang Dikelola Pps-Bsn	32
Sasaran 5 Meningkatkan Kualitas Sdm Perumusan Standar	35
11.Indikator Kinerja: Jumlah Sumberdaya Perumusan Standar Yang Meningkatkan Kompetensinya	36
Sasaran 6 Meningkatkan Kualitas Komtek/Subkomtek Perumusan Standar	38
12.Indikator Kinerja: Jumlah Komtek/Subkomtek Yang Telah Memenuhi Kriteria Penilaian Evaluasi Kinerja	39
13.Indikator Kinerja: Persentase Komtek/Subkomtek Perumusan Sni Yang Dievaluasi Kinerjanya	41
Sasaran 7 Terwujudnya Fasilitasi Program Perumusan Sni	43
14.Indikator Kinerja: Jumlah Sni Yang Dikaji Ulang	43
15.Indikator Kinerja: Jumlah Fasilitasi Perumusan Rsn	45

16.Indikator Kinerja: Jumlah Fasilitas Penerjemahan Dokumen Sni/Si Yang Digunakan Sebagai Rsn	46
Sasaran 8 Terwujudnya Pengembangan Sni Yang Koheren Dengan Perkembangan Standar Internasional	48
17.Indikator Kinerja: Jumlah Dokumen Rekomendasi Kertas Posisi Indonesia Terkait Harmonisasi Standar Dalam Forum Kerjasama Standardisasi Regional/Multilateral	49
18.Indikator Kinerja: Persentase Tanggapan Indonesia Dalam Forum Pengembang Standar Internasional	50
19.Indikator Kinerja: Persentase Fasilitas Perumusan Standar Yang Mengadopsi Publikasi Dari Sdo	51
Sasaran 9 Meningkatnya Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Dan Organisasi Pps Yang Profesional	51
20.Indikator Kinerja: Persentase Aparatur Sipil Negara (Asn) Pps Yang Meningkatkan Kompetensinya	52
21.Indikator Kinerja: Realisasi Anggaran Pps	54
22.Indikator Kinerja: Persentase Pencapaian Kinerja Pps	56
23.Indikator Kinerja: Persentase Tindak Lanjut Atas Hasil Pengawasan Eksternal	58
24.Indikator Kinerja: Persentase Tindak Lanjut Atas Hasil Pengawasan Internal	59
25.Indikator Indikator Kinerja: Persentase Implementasi Rb Bsn Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Unit Pps	59
III.2 Realisasi Anggaran	60
Bab IV Penutup	61
Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Kepala Pusat Perumusan Standar	66

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 - Personel ASN Kepala Pusat Perumusan Standar	4
Tabel I.2 - Potensi dan Permasalahan Kepala Pusat Perumusan Standar	5
Tabel III.1 - Pencapaian Kinerja Kepala Pusat Perumusan Standar Tahun 2017 ...	14
Tabel III. 2 - Capaian Kinerja Sasaran I.....	17
Tabel III.3 – Pertumbuhan SNI yang siap diterapkan oleh Industri/Organisasi	18
Tabel III.4 – Pertumbuhan SNI yang siap diterapkan oleh Industri/Organisasi	19
Tabel III.4 – Pertumbuhan SNI yang siap diterapkan oleh Industri/Organisasi	20
Tabel III.6 – Jumlah RSNI yang diusulkan untuk ditetapkan dalam memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri.....	22
Tabel III. 7 - Capaian Kinerja Sasaran III	22
Tabel III.8 – Target dan realisasi pencapaian sasaran kinerja: jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis Perumusan SNI	24
Tabel III.9 – Target dan realisasi pencapaian sasaran kinerja: jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)	25
Tabel III.11 - Target dan realisasi penetapan SNI Tahun 2017	31
Tabel III.7 – Pengelolaan sekretariat Komtek di PPS - BSN	33
Tabel III.8 – Sekretariat Komtek/SubKomtek Perumusan SNI yang dikelola oleh PPS	34
Tabel III. 9.....	35
Capaian Kinerja Sasaran IV	35
Tabel III.10 – Rekapitulasi Pelaksanaan Workshop SDM Perumusan Standar	36
Tabel III.11 - Capaian Kinerja Sasaran VI	38
Tabel III.12 - Kriteria evaluasi kinerja Komtek/Sub Komtek tahun 2016-2017	39
Tabel III.13 - Hasil scoring pelaksanaan evaluasi kinerja Komtek/Sub Komtek tahun 2017	40

Gambar III.11 - Jumlah Komtek/Subkomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja.....	41
Tabel III.14 - Capaian Kinerja Sasaran VII	43
Tabel III.15 - Komtek/Sub Komtek yang difasilitasi tahun 2017	45
Tabel III.16 - Fasilitasi terjemahan kepada Komtek/Sub Komtek tahun 2017.....	46
Gambar III.17 - Persentase Capaian Tanggapan Indonesia dalam forum Pengembang Standar Internasional.....	50
Tabel III.18 - Persentase fasilitasi Perumusan adopsi SDO PPS.....	51
Tabel III.21 - Realisasi Anggaran PPS tahun 2017 berdasarkan output anggaran	54
Tabel III.23 - Realisasi Anggaran PPS tahun 2017 berdasarkan komponen mata anggaran	55
Tabel III.24 - Perbandingan Realisasi Anggaran PPS di tahun 2016 dan 2017	55
Tabel III.25 - Pencapaian Kinerja PPS tahun 2017	56
Tabel III.26 - Persentase Pencapaian Kinerja Pusat Perumusan Standar	57
Tabel III.27 – Tindak lanjut pengawasan eksternal Pusat Perumusan Standar	59
Tabel III.28 – Tindak lanjut pengawasan internal	59
Tabel III.29 - Pagu dan Realisasi Anggaran Kepala Pusat Perumusan Standar TA 2017	60
Tabel IV.1 - Pencapaian Kinerja Kepala Pusat Perumusan Standar Tahun 2017 ..	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 - Struktur Organisasi Kepala Pusat Perumusan Standar	3
Gambar I.2 - Grafik Personel ASN Pusat Perumusan Standar	4
Gambar III.1 – Perbandingan Pertumbuhan SNI yang Siap Diterapkan oleh Industri/Organisasi di Setiap Bidang	18
Gambar III.2 – Perbandingan Pertumbuhan Jumlah SNI yang Siap Mendukung Produk Unggulan Nasional di Setiap Bidang	19
Gambar III.4 – Perbandingan target dan realisasi Rekomendasi persetujuan MTPS untuk Komtek/Sub Komtek tahun 2017	24
Gambar III.6 – Perbandingan target dan realisasi penatapan SNI Tahun 2017	32
Gambar III.7 – Perbandingan jumlah RASNI PPS tahun 2016 dan 2017	32
Gambar III.8 - Pengelolaan sekretariat Komtek di PPS – BSN.....	33
Gambar III.9 – Perbandingan jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya antara tahun 2016 dan tahun 2017	36
Gambar III.10 - Jumlah Komtek/Subkomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja.....	41
Gambar III.11 - Persentase Komtek/Subkomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya.....	42
Gambar III.12 - Jumlah SNI yang dikaji ulang	44
Gambar III.13 - Jumlah fasilitasi perumusan RSNI	46
Gambar III.14 - Jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI.....	48
Gambar III.15 - Jumlah Rekomendasi kertas posisi Indonesia	49

I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Kepala Pusat Perumusan Standar, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Kepala Pusat Perumusan Standar memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Deputy bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Kepala Pusat Perumusan Standar merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Deputy bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi tahun 2017.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kepala Pusat Perumusan Standar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan

misi Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

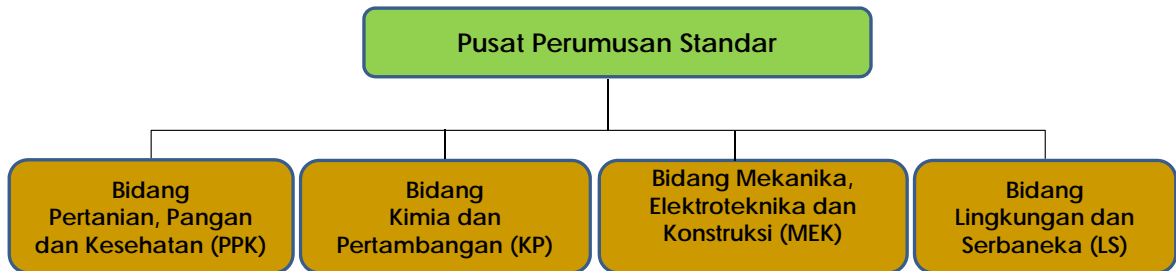
I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Kepala Pusat Perumusan Standar adalah melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun international.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Kepala Pusat Perumusan Standar menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan rumusan kebijakan di bidang perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;
2. pembinaan dan pengembangan sistem perumusan Standar Nasional Indonesia
3. perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia
4. pelaksanaan evaluasi perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia

Struktur Kepala Pusat Perumusan Standar dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1 - Struktur Organisasi Kepala Pusat Perumusan Standar

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Kepala Pusat Perumusan Standar mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Kepala Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan (PPK), dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program, dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang pertanian, pangan dan kesehatan.
2. Kepala Bidang Kimia dan Pertambangan (KP), dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang kimia dan pertambangan.
3. Kepala Bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi (MEK), dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang mekanika, elektroteknika, dan konstruksi.
4. Kepala Bidang Lingkungan dan Serbaneka (LS), dengan tugas melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi

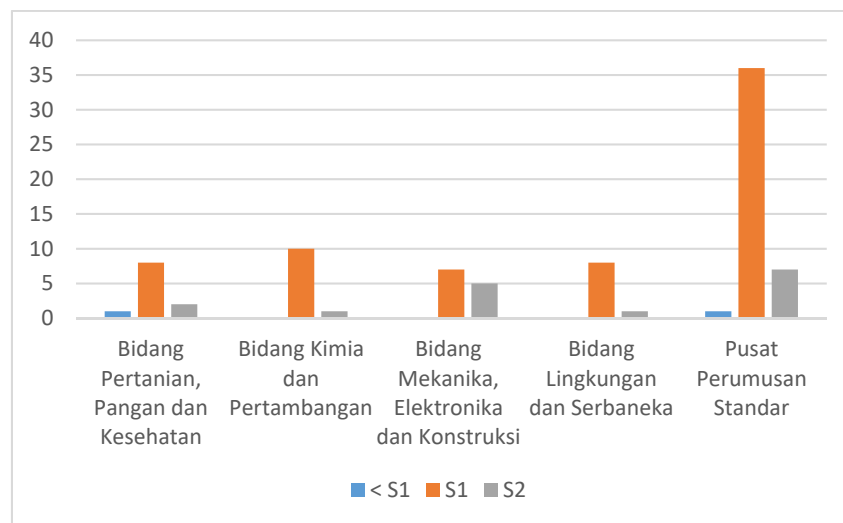
standar dan memenuhi permintaan tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang lingkungan dan serbaneka.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2017 Kepala Pusat Perumusan Standar memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak empat puluh empat (44) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1 - Personel ASN Kepala Pusat Perumusan Standar

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		< S1	S1	S2	
1.	Kepala Pusat Perumusan Standar	-	-	1	1
2.	Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan	1	8	2	11
3.	Bidang Kimia dan Pertambangan	-	10	1	11
4.	Bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi	-	7	5	12
5.	Bidang Lingkungan dan Serbaneka	-	8	1	9
Jumlah		1	36	7	44



Gambar I.2 - Grafik Personel ASN Pusat Perumusan Standar

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Kepala Pusat Perumusan Standar mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu untuk menjamin bahwa dalam pengembangan SNI, seluruh Komite Teknis/Sub Komite Teknis (Komtek/SubKomtek) dan para pemangku kepentingan yang terkait senantiasa taat azas dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN). Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Kepala Pusat Perumusan Standar telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2 - Potensi dan Permasalahan Kepala Pusat Perumusan Standar

NO	POTENSI	NO	PERMASALAHAN	NO	TINDAK LANJUT
1	SNI yang ditetapkan memenuhi ketentuan PERKA BSN terkait Pengembangan SNI	1	Adanya sejumlah SNI yang ditetapkan belum memenuhi ketentuan PERKA BSN terkait Pengembangan SNI	1	SNI yang ditetapkan didorong untuk memenuhi ketentuan PERKA BSN terkait Pengembangan SNI
2	SNI dapat mendukung produk unggulan Nasional untuk meningkatkan daya saingnya	2	SNI yang ditetapkan belum mendukung produk unggulan untuk meningkatkan daya saingnya	2	Pengembangan SNI diarahkan untuk mendukung produk unggulan Nasional
3	SNI dapat menjamin mutu produk yang beredar dipasar retail	3	Produk retail yang beredar dipasar belum banyak yang ber SNI	3	Pengembangan SNI untuk memfasilitasi kebutuhan produk yang beredar dipasar retail
4	SNI dibutuhkan sebagai referensi oleh industri/organisasi	4	Beberapa SNI yang ditetapkan belum diterapkan oleh industri/organisasi	4	Pengembangan SNI untuk memfasilitasi kebutuhan industri/organisasi

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi



umusan visi dan misi Kepala Pusat Perumusan Standar sesuai Renstra Kepala Pusat Perumusan Standar Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

Terwujudnya proses Perumusan SNI yang taat azas dan tepat waktu

MISI

1. Mengembangkan dan memperkuat sistem pengembangan SNI
2. Menyempurnakan kebijakan pengembangan SNI
3. Melaksanakan pengelolaan komtek/subkomtek pengembangan SNI
4. Melaksanakan pembinaan komtek/subkomtek dan personel terkait dengan pengembangan SNI
5. Memfasilitasi proses pengembangan SNI secara taat azas

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Kepala Pusat Perumusan Standar telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Kepala Pusat Perumusan Standar yaitu “Jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan”

TUJUAN

Jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan

Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Kepala Pusat Perumusan Standar selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Kepala Pusat Perumusan Standar dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Kepala Pusat Perumusan Standar harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2017, sasaran Kepala Pusat Perumusan Standar telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Kepala Pusat Perumusan Standar Tahun 2015-2019 yaitu tersedianya Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Kepala Pusat Perumusan Standar berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI
3. Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional
4. Terwujudnya SNI yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan PERKA BSN
5. Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar
6. Meningkatnya kualitas Komtek/Subkomtek perumusan standar
7. Terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI

8. Terwujudnya pengembangan SNI yang koheren dengan perkembangan standar internasional
9. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PPS yang profesional.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Kepala Pusat Perumusan Standar sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Perumusan Standar Tahun 2017 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Perumusan Standar tahun 2017 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1 - Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Perumusan Standar Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Customer Perspectives			
1) Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1. Pertumbuhan SNI yang siap diterapkan oleh industri / organisasi	SNI	300
	2. Pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk unggulan nasional	SNI	100
	3. Pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk yang beredar di pasar retail	SNI	100
Internal Process Perspectives			
2) Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4. Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	Rekomendasi	6
	5. Jumlah SNI yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan regulasi, produk unggulan nasional, produk retail dalam negeri.	SNI	500
3) Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional	6. Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	Rekomendasi	36
	7. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)	Rekomendasi	500
	8. Jumlah rancangan PERKA BSN terkait pengembangan SNI	rancangan	2
4) Terwujudnya SNI yang ditetapkan	9. Jumlah SNI yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan PERKA BSN	SNI	500

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
telah memenuhi ketentuan PERKA BSN	10. Jumlah sekretariat Komtek Perumusan SNI yang dikelola BSN	Sekretariat	36
5) Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar	11. Jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	Orang	600
6) Meningkatnya kualitas Komtek/Subkomtek perumusan standar	12. Jumlah Komtek/Subkomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja	Komtek / Subkomtek	60
	13. Persentase Komtek/Subkomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya	%	100%
7) Terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI	14. Jumlah SNI yang dikaji ulang	SNI	100
	15. Jumlah fasilitasi perumusan RSNI	RSNI	100
	16. Jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI	SNI	30
8) Terwujudnya pengembangan SNI yang koheren dengan perkembangan standar internasional	17. Jumlah dokumen rekomendasi kertas posisi Indonesia terkait harmonisasi standar dalam forum kerjasama standardisasi regional/multilateral	Dokumen	40
	18. Persentase tanggapan Indonesia dalam forum pengembangan standar internasional	%	80
	19. Persentase fasilitasi perumusan standar yang mengadopsi publikasi dari SDO	%	100

Learning and Growth Perspectives

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
9) Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PPS yang profesional.	20. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PPS yang meningkat kompetensinya	%	100%
	21. Realisasi anggaran PPS	%	≥ 95%
	22. Persentase pencapaian kinerja PPS	%	90%
	23. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	%	100%
	24. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	%	100%
	25. Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi unit PPS	%	75%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Kepala Pusat Perumusan Standar pada tahun 2017 menetapkan sebanyak 9 (sembilan) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Kepala Pusat Perumusan Standar melaksanakan kegiatan Perumusan Standar dalam Program Pengembangan Standardisasi Nasional. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Standardisasi Nasional melalui:

Kegiatan: Perumusan Standar, yang akan menghasilkan output 500 SNI

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Perumusan Standar Nasional Indonesia
2. Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi
3. Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Lingkungan dan Serbaneka

4. Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Kimia dan Pertambangan
5. Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Kepala Pusat Perumusan Standar berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Kepala Pusat Perumusan Standar telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Kepala Pusat Perumusan Standar Tahun 2017.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Pusat Perumusan Standar, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Kepala Pusat Perumusan Standar yang direncanakan dalam Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1 - Pencapaian Kinerja Kepala Pusat Perumusan Standar Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realiasi	Capaian
Customer Perspectives					
1) Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1. Pertumbuhan SNI yang siap diterapkan oleh industri / organisasi	SNI	300	349	N/A
	2. Pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk unggulan nasional	SNI	100	76	N/A
	3. Pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk yang beredar di pasar retail	SNI	100	114	N/A
Internal Process Perspectives					
2) Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4. Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	Rekomendasi	6	6	100 %
	5. Jumlah SNI yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan regulasi, produk unggulan nasional, produk retail dalam negeri.	SNI	500	539	107,8%
3) Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional	6. Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	Rekomendasi	36	35	97,22 %
	7. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)	Rekomendasi	500	1043	208,6%
	8. Jumlah rancangan PERKA BSN terkait pengembangan SNI	rancangan	2	6	300%
4) Terwujudnya SNI yang ditetapkan	9. Jumlah SNI yang ditetapkan telah memenuhi	SNI	500	539	107,8 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realiasi	Capaian
telah memenuhi ketentuan PERKA BSN	ketentuan PERKA BSN				
	10. Jumlah sekretariat Komtek Perumusan SNI yang dikelola BSN	Sekretariat	36	34	94,44%
5) Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar	11. Jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	Orang	600	1061	176,8%
6) Meningkatnya kualitas Komtek/Subkomtek perumusan standar	12. Jumlah Komtek/Subkomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja	Komtek / Subkomtek	60	24	40%
	13. Persentase Komtek/Subkomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya	%	100%	100%	100%
7) Terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI	14. Jumlah SNI yang dikaji ulang	SNI	100	656	656%
	15. Jumlah fasilitasi perumusan RSNI	RSNI	100	100	100%
	16. Jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI	SNI	30	51	170%
8) Terwujudnya pengembangan SNI yang koheren dengan perkembangan standar internasional	17. Jumlah dokumen rekomendasi kertas posisi Indonesia terkait harmonisasi standar dalam forum kerjasama standardisasi regional/multilateral	Dokumen	40	49	122%
	18. Persentase tanggapan Indonesia dalam forum pengembang standar internasional	%	80	114	142%
	19. Persentase fasilitasi perumusan	%	100	100	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realiasi	Capaian
	standar yang mengadopsi publikasi dari SDO				
Learning and Growth Perspectives					
9) Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PPS yang profesional.	20. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PPS yang meningkat kompetensinya	%	100%	100%	100%
	21. Realisasi anggaran PPS	%	≥ 95%	97,01%	102%
	22. Persentase pencapaian kinerja PPS	%	90%	77,27%	85%
	23. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	%	100%	100%	100%
	24. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	%	100%	100%	100%
	25. Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi unit PPS	%	75%	100%	133%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Kepala Pusat Perumusan Standar untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III. 2 - Capaian Kinerja Sasaran I

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
1. Pertumbuhan SNI yang siap diterapkan oleh industri/organisasi	300 SNI	349	N/A	N/A	Tahun 2016 tidak dikategorikan menjadi 3
2. Pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk unggulan nasional	100 SNI	76	N/A	N/A	-
3. Pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk yang beredar di pasar retail	100 SNI	114	N/A	N/A	-

Indikator kinerja untuk mengukur meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan dijelaskan bahwa capaian realisasi untuk target indikator kinerja 1, 2, dan 3 secara kumulatif sebesar 539 SNI dari target 500 SNI (107,8%) dengan rincian 94,82 % merupakan capaian untuk 3 kategori (pertumbuhan SNI yang siap diterapkan oleh industri/organisasi, pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk unggulan nasional dan pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk yang beredar di pasar retail). Sedangkan capaian sebesar 12,98 % merupakan jumlah SNI untuk yang bersifat umum (selain 3 kategori tersebut seperti standar dasar, sistem, dan lain lain).

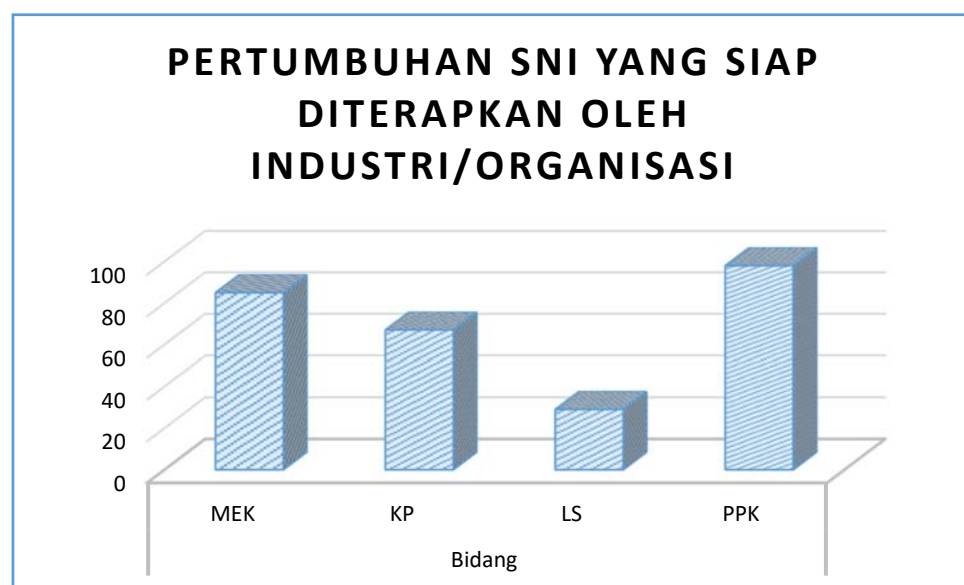
1. Indikator Kinerja: Pertumbuhan SNI yang siap diterapkan oleh industri/organisasi

Dari target 300 Jumlah SNI yang ditetapkan untuk siap diterapkan oleh industri/organisasi Tahun 2017 dicapai 349 SNI. Hal ini disebabkan karena penetapan indikator kinerja ini baru dilakukan pada bulan Februari 2017, sementara usulan PNPS yang disetujui oleh MTPS telah ditetapkan pada bulan November 2016, sehingga penyaringan usulan PNPS agar sesuai indikator target

belum dapat dilaksanakan dengan baik. Namun secara keseluruhan setiap bidang mampu merumuskan SNI yang siap diterapkan oleh industri/organisasi.

Tabel III.3 – Pertumbuhan SNI yang siap diterapkan oleh Industri/Organisasi

Indikator	Satuan	Bidang			
		MEK	KP	LS	PPK
Pertumbuhan SNI yang siap diterapkan oleh industri/organisasi	SNI	85	67	99	98



Gambar III.1 – Perbandingan Pertumbuhan SNI yang Siap Diterapkan oleh Industri/Organisasi di Setiap Bidang

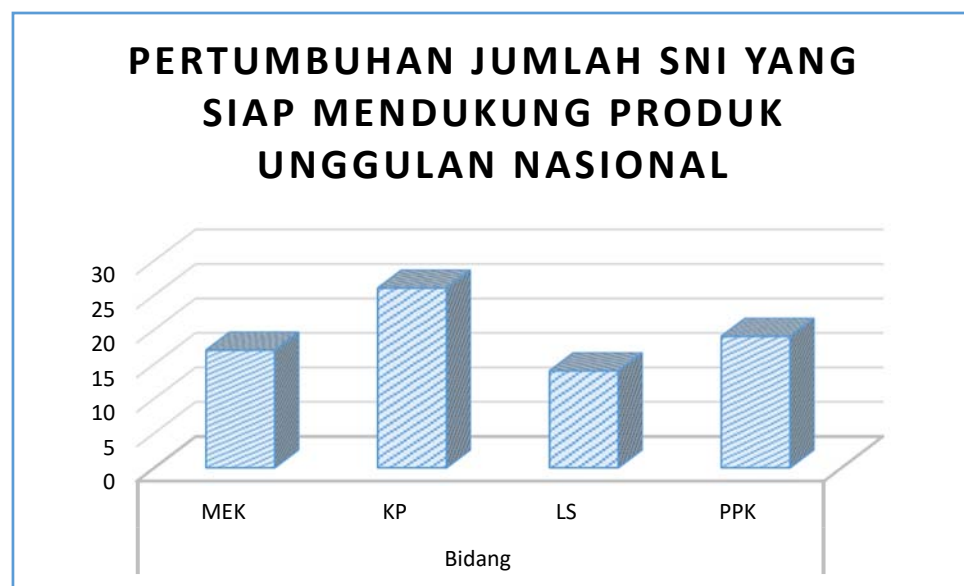
2. Indikator Kinerja: Pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk unggulan nasional

Dari target 100 Jumlah SNI yang ditetapkan untuk siap mendukung produk unggulan nasional Tahun 2017 dicapai 76 SNI. Hal ini disebabkan karena penetapan indikator kinerja ini baru dilakukan pada bulan Februari 2017, sementara usulan PNPS yang disetujui oleh MTPS telah ditetapkan pada bulan November 2016, sehingga penyaringan usulan PNPS agar sesuai indikator target belum dapat dilaksanakan dengan baik. Namun secara keseluruhan setiap

bidang mampu merumuskan SNI yang siap yang ditetapkan untuk siap mendukung produk unggulan nasional.

Tabel III.4 – Pertumbuhan SNI yang siap diterapkan oleh Industri/Organisasi

Indikator	Satuan	Bidang			
		MEK	KP	LS	PPK
Pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk unggulan nasional	SNI	17	26	14	19



Gambar III.2 – Perbandingan Pertumbuhan Jumlah SNI yang Siap Mendukung Produk Unggulan Nasional di Setiap Bidang

3. Indikator Kinerja: pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk yang beredar di pasar retail

Dari target pertumbuhan 100 yang ditetapkan untuk mendukung produk yang beredar di pasar retail, untuk tahun 2017 belum dapat diukur karena belum ada baseline data tahun 2016. Namun demikian, untuk tahun 2017 tercapai 114 SNI dari target 100 SNI. Penetapan indikator kinerja pertumbuhan SNI produk yang beredar di pasar retail mulai ditetapkan pada bulan Februari 2017.

Tabel III.4 – Pertumbuhan SNI yang siap diterapkan oleh Industri/Organisasi

Indikator	Satuan	Bidang			
		MEK	KP	LS	PPK
Pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk yang beredar di pasar retail	SNI	29	37	32	16

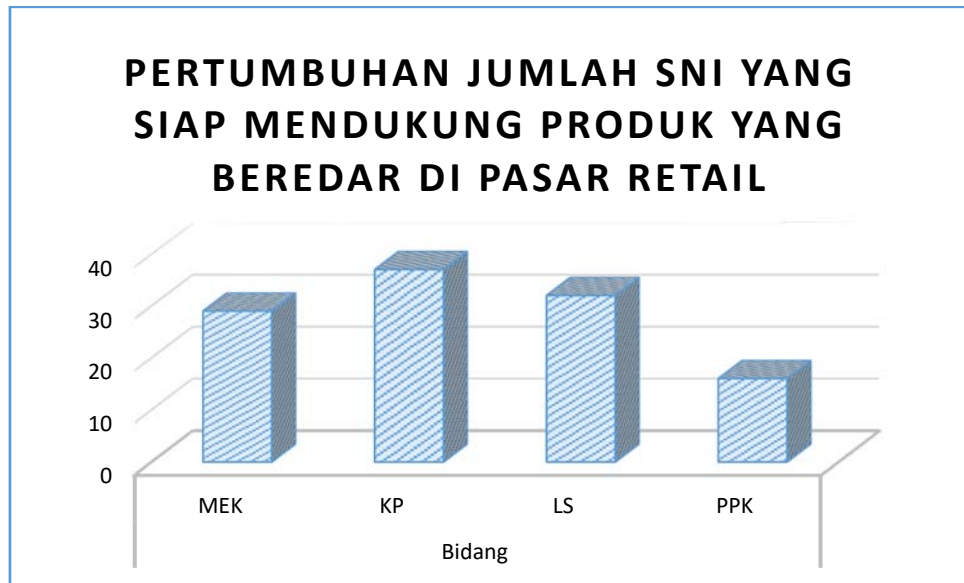


Diagram III.3 – Perbandingan Pertumbuhan Jumlah SNI yang Siap Mendukung Produk yang Beredar di Pasar Retail di Setiap Bidang

Tabel III. 5 - Capaian Kinerja Sasaran II

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan / (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
4. Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	6	6	100%		Terjadi penurunan
5. Jumlah RSNI yang diusulkan untuk ditetapkan dalam memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri	500	539	107,8%	649	Terjadi penurunan

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis Perumusan SNI dan Jumlah RSNI yang diusulkan untuk ditetapkan dalam memenuhi kebutuhan regulasi, produk unggulan nasional, dan produk retail dalam negeri. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 503,8% (untuk indikator kinerja jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI tercapai 100% dan indikator kinerja Jumlah RSNI yang diusulkan untuk ditetapkan dalam memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri tercapai 107,8%). Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

4. Indikator Kinerja: jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis Perumusan SNI

Pada tahun 2017, MTPS yang beranggotakan 23 orang wakil dari berbagai K/L dan wakil dari pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam perumusan SNI, telah melaksanakan tugasnya dengan mengadakan 6 kali pertemuan, dan

menghasilkan 6 (enam) paket rekomendasi kebijakan. Memperhatikan Sasaran kedua yang ditetapkan pada tahun 2017, maka dapat diinformasikan dari target 6 jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI untuk sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI telah tercapai 6 rekomendasi (100%).

5. Indikator Kinerja: Jumlah RSNI yang diusulkan untuk ditetapkan dalam memenuhi kebutuhan regulasi, produk unggulan nasional, dan produk retail dalam negeri

Pemenuhan kinerja ini diperlukan dalam rangka menjamin ketersediaan SNI yang mampu mendukung kebutuhan regulasi, menjadi produk unggulan dan tersedia di pasar retail dalam negeri.

Memperhatikan Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PPS yang ditetapkan pada tahun 2017, maka dapat diinformasikan dari target 500 RSNI yang diusulkan untuk ditetapkan dalam memenuhi kebutuhan regulasi, produk unggulan nasional, dan produk retail dalam negeri, tercapai 539 RSNI (107,8%). Adapun distribusi capaian RSNI tersebut dari masing-masing bidang sebagai berikut:

Tabel III.6 – Jumlah RSNI yang diusulkan untuk ditetapkan dalam memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri

Indikator Kinerja	Bidang			
	MEK	KP	LS	PPK
Jumlah RSNI yang diusulkan untuk ditetapkan dalam memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri	131	130	145	133

SASARAN 3

Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional

Tabel III. 7 - Capaian Kinerja Sasaran III

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian %		
6. Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	36	35	97,22 %	87	Terjadi penurunan
7. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)	500	1043	208,6 %	649	Terjadi peningkatan
8. Jumlah rancangan PERKA BSN terkait pengembangan SNI	2	6	300 %	4	Terjadi peningkatan

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis Perumusan SNI, jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) dan jumlah rancangan PERKA BSN terkait pengembangan SNI. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 201,94 %. Capaian kinerja untuk indicator kinerja tersebut masih belum merata pemenuhannya terhadap target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

6. Indikator Kinerja: jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis Perumusan SNI

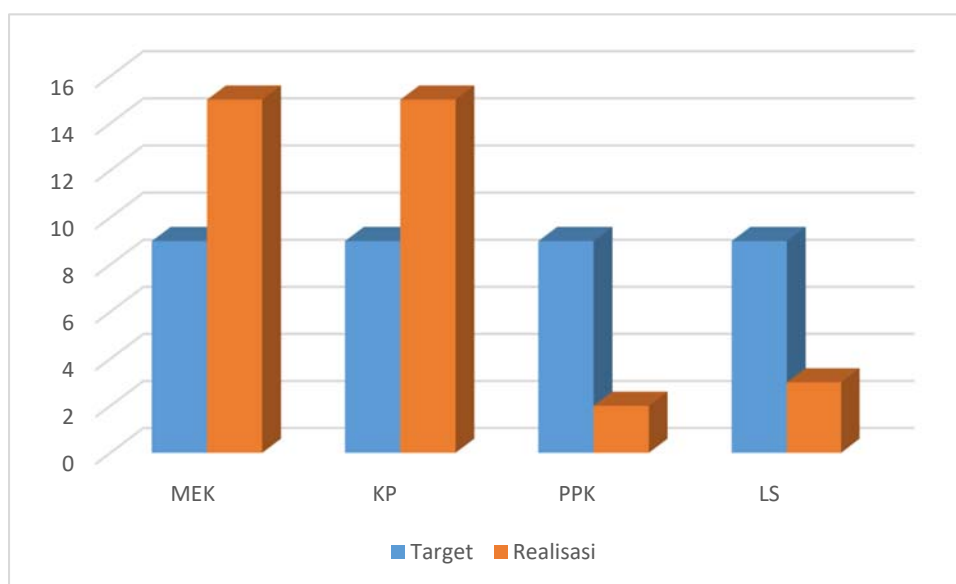
Pada tahun 2017, MTPS yang beranggotakan 23 orang wakil dari berbagai K/L yang mengelola Komite Teknis/SubKomite Teknis Perumusan SNI, dan wakil dari pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam perumusan SNI, telah melaksanakan tugasnya, dimana selama tahun 2017 MTPS telah mengadakan 6 kali pertemuan, dan menghasilkan 6 (enam) paket rekomendasi kebijakan.

Memperhatikan Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PPS yang ditetapkan pada tahun 2017, maka dapat diinformasikan dari target 9 jumlah

rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI, capaian Pusat Perumusan Standar sebagaimana tercantum di Tabel berikut:

Tabel III.8 – Target dan realisasi pencapaian sasaran kinerja: jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis Perumusan SNI

No.	Bidang	Target	Realisasi	Capaian
1	MEK	9	15	166,67 %
2	KP	9	15	166,67 %
3	PPK	9	2	22,22 %
4	LS	9	3	33,33 %
Jumlah		36	35	97,22 %



Gambar III.4 – Perbandingan target dan realisasi Rekomendasi persetujuan MTPS untuk Komtek/Sub Komtek tahun 2017

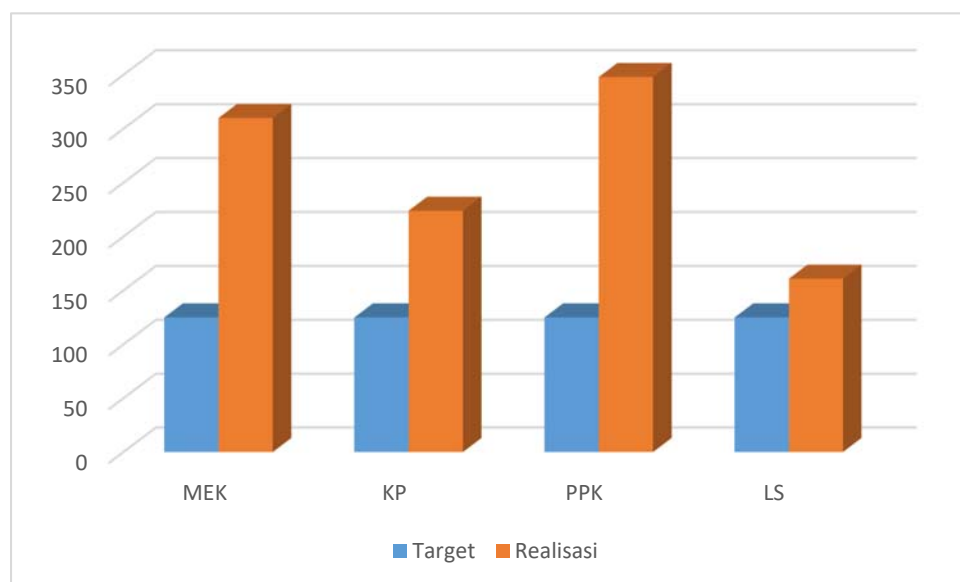
7. Indikator Kinerja: jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)

Memperhatikan Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PPS yang ditetapkan pada tahun 2017, maka dapat diinformasikan dari target 500

rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS), capaian masing – masing bidang dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel III.9 – Target dan realisasi pencapaian sasaran kinerja: jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)

No.	Bidang	Target	Realisasi	Capaian
1	MEK	125	310	248,0 %
2	KP	125	224	179,2 %
3	PPK	125	348	278,4 %
4	LS	125	161	128,8 %
Jumlah		500	1043	208,6 %



Gambar III.5 – Perbandingan target dan realisasi rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)

Dengan adanya pengembangan sistem informasi standarisasi dan penilaian kesesuaian (SISPK) yang dapat diakses secara online melalui <http://sispk.bsn.go.id>, hal ini menjadikan proses pengusulan PNPS sebagai kerjasama antara sekretariat komtek (di kementerian maupun di BSN) dengan

PIC Komtek di BSN sehingga proses penjangkaran PNPS dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

8. Indikator Kinerja: jumlah rancangan PERKA BSN terkait pengembangan SNI

Rancangan Peraturan Kepala BSN terkait pengembangan SNI, disusun dengan maksud agar Pedoman yang telah dan akan digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan SNI sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada. Keegiatannya meliputi:

- 1) penyusunan konsep,
- 2) pembahasan internal PPS,
- 3) pelaksanaan Public Hearing RPSN dengan para pemangku kepentingan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017 untuk RPSN Kaji ulang dan Pedoman Penulisan
- 4) finalisasi naskah akhir PSN untuk proses penetapan melalui Peraturan Kepala BSN.

Rancangan Peraturan Kepala BSN yang disusun pada tahun 2017 adalah:

1. Rancangan Peraturan Kepala BSN tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia
2. Rancangan Peraturan Kepala BSN tentang Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia
3. Rancangan Peraturan Kepala BSN tentang Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional menjadi Standar Nasional Indonesia
4. Rancangan Peraturan Kepala BSN tentang Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia
5. Rancangan Peraturan Kepala BSN tentang Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia
6. Rancangan Peraturan Kepala BSN tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia

Draft keenam judul Rancangan PERKA BSN tersebut telah diusulkan ke Biro Hukum Organisasi dan Humas untuk diproses lebih lanjut menjadi PERKA BSN. Dengan demikian, target 2 usulan rancangan PERKA BSN terkait pengembangan

SNI pada tahun 2017 yang ditetapkan oleh BSN, PPS telah mampu mencapainya, bahkan melebihi target (6 rancangan).

SASARAN 4

Terwujudnya SNI yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan PERKA BSN

Tabel III.10 - Capaian Kinerja Sasaran IV

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
9. Jumlah SNI yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan PERKA BSN	500	539	107,8 %	490	Terjadi peningkatan
10. Jumlah sekretariat Komtek Perumusan SNI yang dikelola BSN	36	34	94,44 %	29	Terjadi peningkatan

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terwujudnya SNI yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan PERKA BSN terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu jumlah SNI yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan PERKA BSN dan jumlah sekretariat Komtek Perumusan SNI yang dikelola BSN. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 101,12 %. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata – rata capaian di atas target yang ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja.

9. Indikator Kinerja: jumlah SNI yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan PERKA BSN

Dalam proses perumusan SNI, terdapat beberapa Peraturan Kepala BSN yang

terkait dengan pengembangan SNI, antara lain terdiri dari:

- 1) Perka BSN Nomor 8 tahun 2015 tentang Pedoman pengembangan Standar Nasional Indonesia,

- 2) Perka BSN Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman penomoran SNI,
- 3) Perka BSN Nomor 4 tahun 2016 tentang Pedoman penulisan Standar Nasional Indonesia.

Selain Perka BSN tersebut di atas, masih ada beberapa pedoman yang telah ditetapkan oleh BSN yang juga menjadi panduan dan acuan dalam proses perumusan SNI, dan saat ini masih dalam proses revisi untuk penyempurnaan sesuai ketentuan terbaru. Pedoman tersebut terdiri dari:

a) PSN 02:2007 Pengelolaan Panitia Teknis Perumusan SNI

Menguraikan tentang kelembagaan Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS), pembentukan dan pembubaran Komtek/SubKomtek, tugas /tanggung jawab dan pengorganisasian Komtek/SubKomtek, dan pengelolaan sekretariat Komtek/ SubKomtek perumusan SNI.

**b) PSN 03.1:2007 Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya
- Bagian 1: adopsi standar internasional menjadi SNI,**

Menguraikan tentang tatacara adopsi standar internasional, apa yang boleh/ tidak boleh berubah dalam adopsi identik atau modifikasi, klasifikasi standar sebagai identik/modifikasi/tidak ekivalen (IDT/MOD/NEQ).

**c) PSN 03.2:2014 Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya
- Bagian 2: adopsi non standar internasional menjadi SNI,**

Menguraikan tentang tatacara adopsi publikasi internasional non standar, apa yang boleh/ tidak boleh berubah dalam adopsi identik atau modifikasi, jenis publikasi internasional non standar yang dapat diadopsi menjadi SNI.

d) PSN 04:2006 Jajak pendapat dan pemungutan suara dalam rangka perumusan SNI

Menguraikan tentang prosedur, tatacara pelaksanaan jajak pendapat dan pemungutan suara, cara perhitungan serta sarana pendukung yang diperlukan.

e) PSN 05:2006 Tenaga ahli standardisasi untuk pengendali mutu perumusan SNI

Menguraikan tentang pengelolaan tenaga ahli pengendali mutu perumusan SNI (TAS QC) dalam mendukung perumusan SNI yang taat azas dan ketentuan; kriteria, tugas dan kewajiban TAS-QC.

f) PSN 07:2012 Standardisasi dan kegiatan yang terkait – Istilah umum

Menguraikan istilah di bidang standardisasi dan kegiatan yang terkait agar terdapat kesamaan pengertian dan konsistensi penggunaan dalam perumusan SNI.

g) PSN 10:2012 Adopsi standar ASTM menjadi SNI,

Menguraikan tentang tatacara adopsi standar ASTM international, apa yang boleh/ tidak boleh berubah dalam adopsi identik Standar ASTM.

Mengacu pada penetapan kinerja PPS tahun 2017, target penetapan SNI yang ingin dicapai adalah 500 SNI, dimana target masing – masing bidang adalah 125 SNI. Realisasi penetapan PPS pada tahun 2017 telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu tercapai 539 SNI.

Realisasi penetapan SNI tersebut tidak terlepas dari jumlah Rancangan Akhir SNI yang diajukan oleh Pusat Perumusan Standar ke Biro Hukum, Organisasi dan Humas – BSN untuk penetapan melalui Surat Keputusan Kepala BSN.

Upaya untuk mencapai jumlah RASNI yang memenuhi target penetapan SNI tahun 2017 dilaksanakan dengan melalui tiga kegiatan utama yang terdiri dari:

i. Koordinasi penyelesaian masalah Komtek/SubKomtek

Pusat Perumusan Standar memfasilitasi penyelesaian masalah Komtek/ SubKomtek terkait duplikasi PNPS, komposisi keanggotaan Komtek/Sub Komtek, pembagian ruang lingkup antar Komtek, penetapan SNI dan permasalahan lain sesuai kebutuhan, termasuk koordinasi tindak lanjut keputusan MTPS yang harus segera diselesaikan.

ii. Pengendalian perumusan SNI

BSN mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa prosedur dan ketentuan yang terdapat dalam PSN pengembangan SNI diikuti oleh Komite Teknis/ Sub Komite Teknis dalam setiap proses perumusan SNI. Pengendalian ini dilakukan dengan menugaskan Staf PPS dan/atau Tenaga Pengendali Mutu Perumusan SNI.

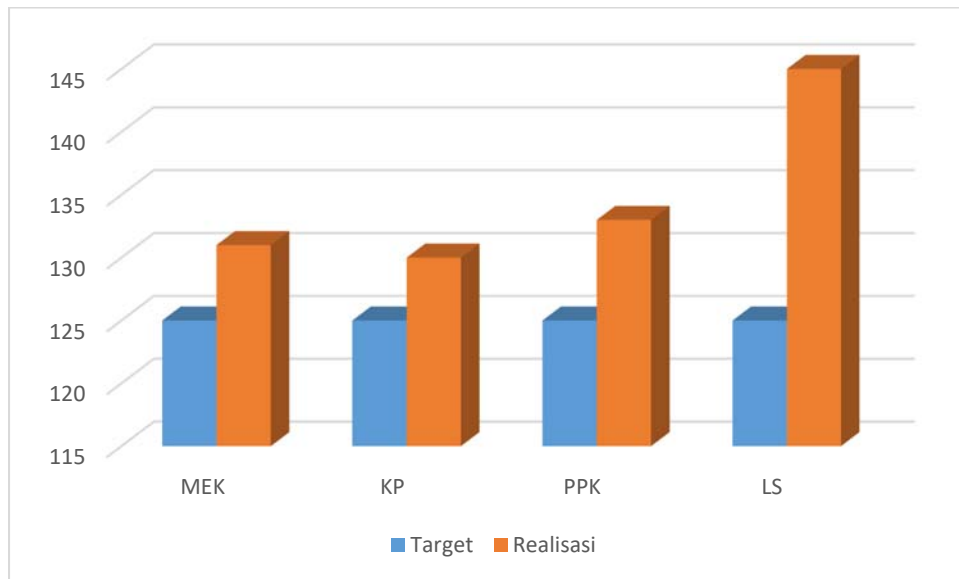
iii. Pemeliharaan SNI

Komite Teknis/ Sub Komite Teknis berkewajiban memelihara SNI yang termasuk dalam ruang lingkungnya dengan melalui pelaksanaan kaji ulang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan. Kaji ulang ini bertujuan untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga SNI yang dipublikasikan terjamin kelayakan dan kekiniannya. Pusat Perumusan Standar juga mempunyai kewajiban untuk mengingatkan Komite Teknis/ Sub Komite Teknis untuk melakukan pemeliharaan dengan cara mengelompokkan SNI yang perlu untuk dikaji ulang, dan memberikan dukungan fasilitasi kaji ulang apabila diperlukan.

Jumlah SNI yang telah ditetapkan telah memenuhi ketentuan PERKA BSN dapat dilihat dalam table berikut:

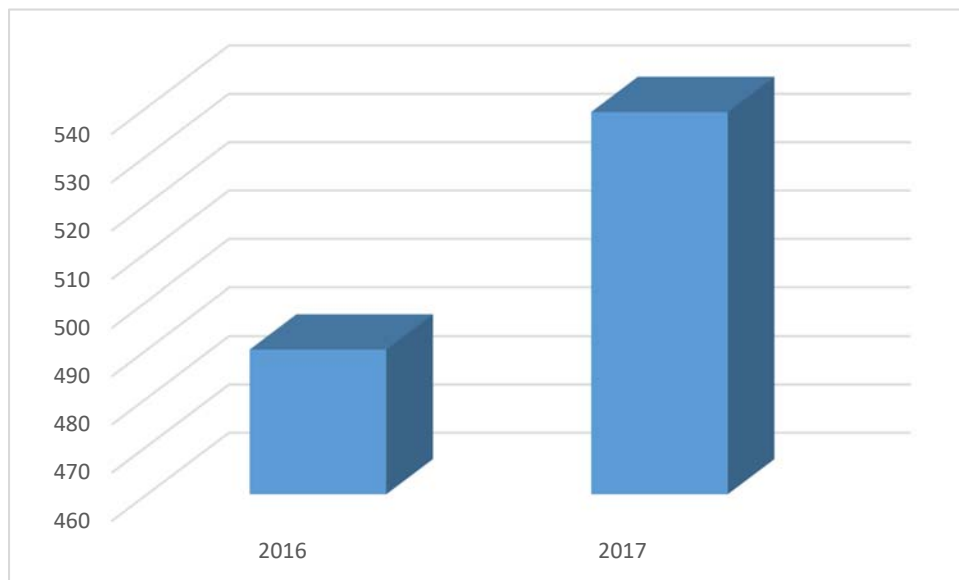
Tabel III.11 - Target dan realisasi penetapan SNI Tahun 2017

No.	Bidang	Target	Realisasi	Capaian
1	MEK	125	131	105 %
2	KP	125	130	104 %
3	PPK	125	133	106%
4	LS	125	145	116 %
Jumlah		500	539	108 %



Gambar III.6 – Perbandingan target dan realisasi penetapan SNI Tahun 2017

Perbandingan realisasi penetapan SNI antara tahun 2016 dan 2017 dapat digambarkan sebagaimana diagram di bawah ini :



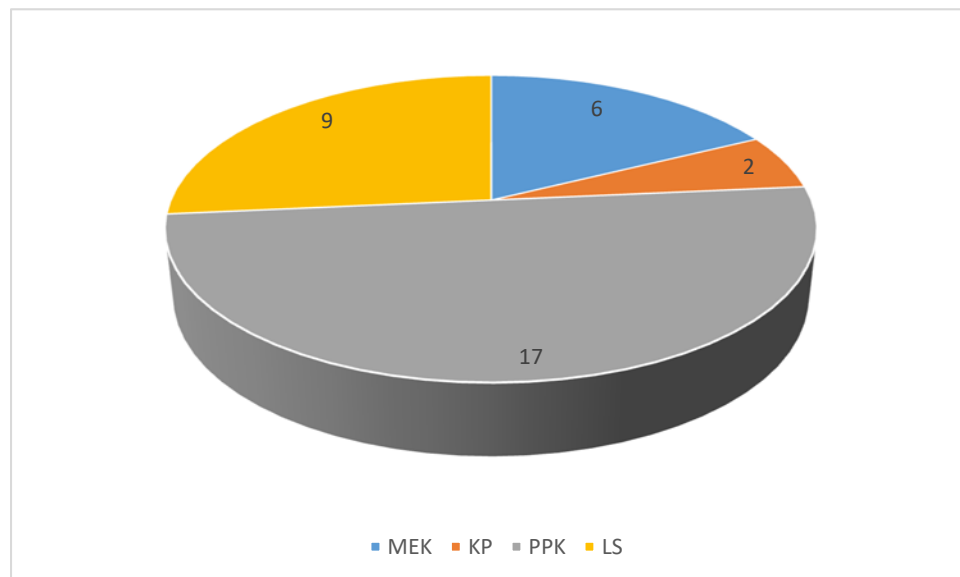
Gambar III.7 – Perbandingan jumlah RASNI PPS tahun 2016 dan 2017

10. Indikator Kinerja: jumlah sekretariat Komtek Perumusan SNI yang dikelola PPS-BSN

Dari 146 Komtek yang ada pada tahun 2017, ada 34 Komtek yang dikelola oleh BSN. Distribusi Komtek pada masing – masing bidang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.12 – Pengelolaan sekretariat Komtek di PPS - BSN

No.	Bidang	Jumlah Komtek yang dikelola PPS - BSN
1	MEK	6
2	KP	2
3	PPK	17
4	LS	9
Jumlah		34



Gambar III.8 - Pengelolaan sekretariat Komtek di PPS – BSN

Secara lebih lengkap 34 (tiga puluh empat) Sekretariat Komtek/Sub Komtek yang dikelola oleh PPS-BSN dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini:

Tabel III.13 – Sekretariat Komtek/SubKomtek Perumusan SNI yang dikelola oleh PPS

No	Komtek/SubKomtek	Nama Komtek	Sekretariat Pengelola Komtek
1.	03-02	Sistem Manajemen Mutu	Bidang LS - PPS
2.	03-05	Lembaga penilaian kesesuaian	Bidang LS - PPS
3.	03-06	Tanggung Jawab Sosial	Bidang LS - PPS
4.	03-08	Halal	Bidang PPK - PPS
5.	03-09	Manajemen pariwisata	Bidang LS - PPS
6.	03-10	Manajemen risiko	Bidang LS - PPS
7.	07-03	Nanoteknologi	Bidang LS - PPS
8.	11-06	Kontrasepsi	Bidang PPK - PPS
9.	11-07	Produk Optik dan Fotonik	Bidang PPK - PPS
10.	11-08	Prasarana Laboratorium Biologi dan Kimia	Bidang PPK - PPS
11.	11-10	Sistem Manajemen Peralatan Kesehatan	Bidang PPK - PPS
12.	11-11	Produk Higiene Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Bidang PPK - PPS
13.	11-12	Kedokteran gigi	Bidang PPK - PPS
14.	11-13	Sterilisasi Produk Pelayanan Kesehatan	Bidang PPK - PPS
15.	13-04	Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran	Bidang MEK - PPS
16.	13-08	Penanggulangan bencana	Bidang KP - PPS
17.	13-09	<i>Bio Security Level- BSL</i>	Bidang PPK - PPS
18.	13-10	Unit Pengolah Air Minum	Bidang PPK - PPS
19.	17-04	Standar dasar	Bidang LS - PPS
20.	19-04	Metode dan pengujian secara umum	Bidang PPK - PPS
21.	19-06	Metode dan pengujian umum, khusus kimia pangan	Bidang PPK - PPS
22.	27-07	Sistem Refrigerant	Bidang MEK - PPS
23.	37-01	Teknologi Grafika	Bidang LS - PPS
24.	43-02	Kendaraan jalan raya bertenaga listrik	Bidang MEK - PPS
25.	45-01	Sarana Perkeretaapian	Bidang MEK - PPS
26.	45-02	Prasarana Perkeretaapian	Bidang MEK - PPS
27.	65-03	Pertanian	Bidang PPK - PPS
28.	65-09	Kakao dan Produk Kakao	Bidang PPK - PPS

No	Komtek/SubKomtek	Nama Komtek	Sekretariat Pengelola Komtek
29.	65-10	Kopi dan Produk Kopi	Bidang PPK - PPS
30.	67-06	Bioteknologi	Bidang PPK - PPS
31.	67-07	Analisis sensori	Bidang PPK - PPS
32.	67-08	Sistem Manajemen Keamanan Pangan	Bidang PPK - PPS
33.	71-05	Minyak Atsiri	Bidang KP - PPS
34.	79-02	Uji fisik dan mekanik kayu	Bidang MEK - PPS

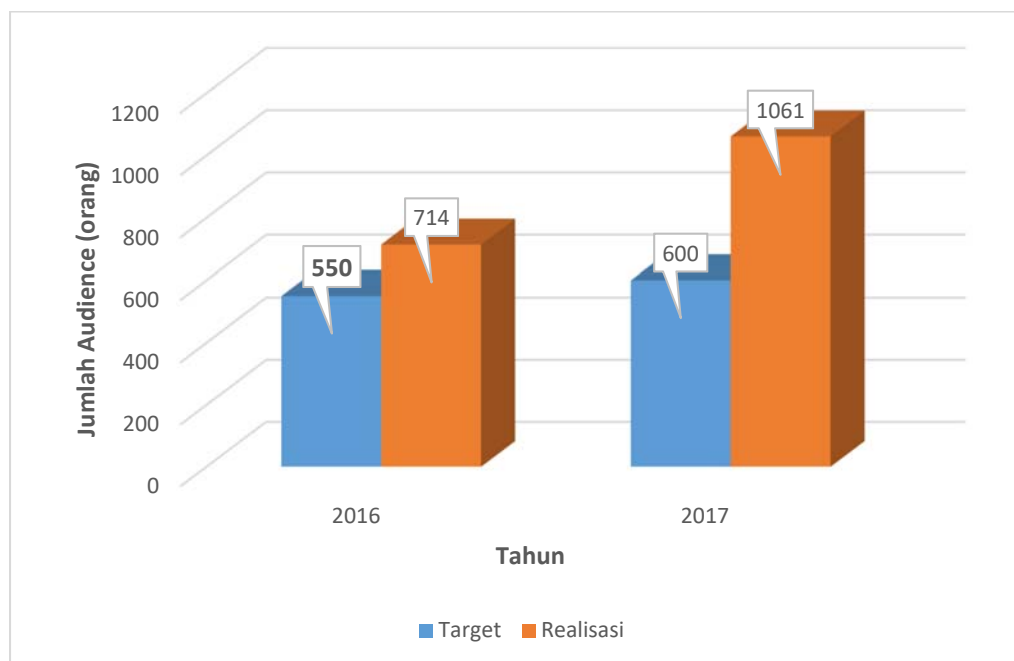
SASARAN 5

Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar

Tabel III.14 - Capaian Kinerja Sasaran IV

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
11. Jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	600 orang	1061 orang	176.8	714 orang (129.8% dari target 550 orang)	Peningkatan

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran: Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 1061 orang (176.8%), melampaui target yang telah ditentukan sebesar 600 orang. Capaian indikator kinerja tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian indikator kinerja pada tahun 2016.



Gambar III.9 – Perbandingan jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya antara tahun 2016 dan tahun 2017

Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 5, sebagai berikut:

11. Indikator Kinerja: jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut sebesar 1061 orang (176.8%), melampaui target yang telah ditentukan sebesar 600 orang. Capaian indikator kinerja tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian indikator kinerja pada tahun 2016.

Tabel III.15 – Rekapitulasi Pelaksanaan Workshop SDM Perumusan Standar

No	Jenis Training/Workshop	Tempat	Waktu	Jumlah Audience (orang)
1.	Pemahaman PSN dan Produk Hukum (<i>In house Training</i>)	Bandung	24 Maret 2017	48
2.	Workshop Temu Anggota Industri Kelistrikan	Jakarta	23 Maret 2017	53

3.	Workshop Sekretariat Komite Teknis	Jakarta	29 Maret 2017	51
4.	Workshop Perumusan SNI Ruang Lingkup Damkar	Jakarta	24 Mei 2017	41
5.	Workshop Internal SDM PPS "Supplier Declaration of Conformity"	Jakarta	3 Maret 2017	40
6.	Magang Laboratorium PT Iapmo Group Indonesia	Cikarang	21-22 Maret 2017	5
7.	Magang Laboratorium Uji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB)	Jakarta	6 - 7 Februari 2017	4
8	Magang Laboratorium Puslitbang Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Bandung	22 – 24 Februari 2017	4
9	Magang Laboratorium Uji Balai Besar Bahan dan Teknik (B4T)	Bandung	22 – 24 Februari 2017	5
10	Training Petugas Pengambilan Contoh (PPC) produk Lampu Swaballast	Jakarta	25-28 April 2017	10
11	Workshop Editor Perumusan SNI Bid. LS	Jakarta	03 Mei 2017	37
12	Workshop Bedah SNI Manajemen Risiko	Bandung	18 Mei 2017	28
13	WS Konseptor Perumusan SNI	Jakarta	15 Maret 2017	30
14	WS Editor Perumusan SNI	Jakarta	8 Maret 2017	30
15	Pelatihan Petugas Pengambilan Contoh/PPC (Batch 1)	Jakarta & Bogor	10-13 April 2017	8
16	Pelatihan Petugas Pengambilan Contoh/PPC (Batch 2)	Jakarta & Bogor	26-28 April 2017	8
17	Pelatihan Petugas Pengambilan Contoh/PPC (Batch 3)	Bogor	14-16 Agustus 2017	1
18	Training pemahaman ISO 17007	Jakarta	15 November 2017	16

19	Training pemahaman ISO 17025	Jakarta	26 Mei 2017	10
20	Training pemahaman TBT-WTO	Jakarta	4 Mei 2017	9
21	Training pemahaman ISO 17020	BSN - Jakarta	18 Juli 2017	36
22	Training penguatan Komite Teknis	Jakarta	30 Agustus 2017	12
23	Training pemahaman ISO 15189	Jakarta,	2-3 Mei 2017	11
24	Training negotiation skills	Jakarta	22-23 Mei 2017	11
25	Training Public Speaking and Personal development	Jakarta	29-30 Nov 2017	11
26	WS pengembangan SNI di daerah	Makasar	25 Okt17	60
27	Temu komtek lingkup bid. PPK	Jakarta	11 April 17	402
28	Temu komtek nasional 2017 (Gabungan PPS)	Jakarta	22 Nov17	50
29	Refreshment PSN lingkup Komtek 65-05	Jakarta	5 Maret 17	30
Total peserta audiece				1061

SASARAN 6

Meningkatnya kualitas Komtek/Subkomtek perumusan standar

Tabel III.16 - Capaian Kinerja Sasaran VI

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
12. Jumlah Komtek/Subkomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja	60	24 (scoring > 40%)	40	70 (komtek/subkomtek yang mendapatkan scoring)	N/A
13. Persentase Komtek / Subkomtek perumusan SNI yang dievaluasi kerjanya	100%	100%	100	92,9%	meningkat

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya kualitas Komtek/Subkomtek perumusan standar terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu jumlah Komtek/Subkomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja dan persentase Komtek/Subkomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 70 %.

12. Indikator Kinerja: Jumlah Komtek/Subkomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja

Dalam proses perumusan SNI, Komite Teknis dan Sub Komite Teknis merupakan kepanjangan tangan BSN, yang pengelolaan kesekretariatannya ditangani oleh beberapa K/L. Oleh karena itu telah menjadi tanggung jawab BSN melalui Pusat Perumusan Standar untuk membina sekretariat Komite Teknis dan Sub Komite Teknis tersebut.

Pembinaan Komite Teknis dan Sub Komite Teknis agar memenuhi ketentuan dalam pengembangan SNI, dilakukan melalui pelaksanaan evaluasi kinerja, yang berbasis pada ketentuan Pedoman tentang Pengelolaan Komite Teknis dan Subkomite Teknis. Evaluasi ini dilakukan secara rutin setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar PPS dalam memperbaiki pengelolaan Komite Teknis dan Sub Komite Teknis, baik yang sekretariatnya dikelola oleh PPS maupun yang dikelola Kementerian/ Lembaga lain.

Hasil evaluasi kinerja ini juga digunakan sebagai dasar penentuan dalam penganugerahan Herudi Technical Committee Award (HTCA) yang akan diberikan kepada Komite Teknis dan Sub Komite Teknis. Evaluasi penilaian kinerja Komite Teknis/ Sub Komite Teknis tahun 2017 menggunakan kriteria berikut ini:

Tabel III.17 - Kriteria evaluasi kinerja Komtek/Sub Komtek tahun 2016-2017

No	Kriteria Evkin	Bobot (%) 2017	Bobot (%) 2016
1	Kinerja Sekretariat	25	35
2	Penyelesaian PNPS sampai dengan Penyerahan RSNI3 ke BSN	25	25

No	Kriteria Evkin	Bobot (%) 2017	Bobot (%) 2016
3	Waktu Perumusan SNI dari PNPS hingga Penyerahan RSNI3 ke BSN (kecuali metode rep-rep)	25	25
4	Pemeliharaan SNI	25	15
Total		100	100

Terdapat 145 Komtek/Sub Komtek yang dievaluasi kinerjanya pada tahun 2017. Hasil lengkap nilai scoring pelaksanaan evaluasi kinerja Komtek/Sub Komtek tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.18 - Hasil scoring pelaksanaan evaluasi kinerja Komtek/Sub Komtek tahun 2017

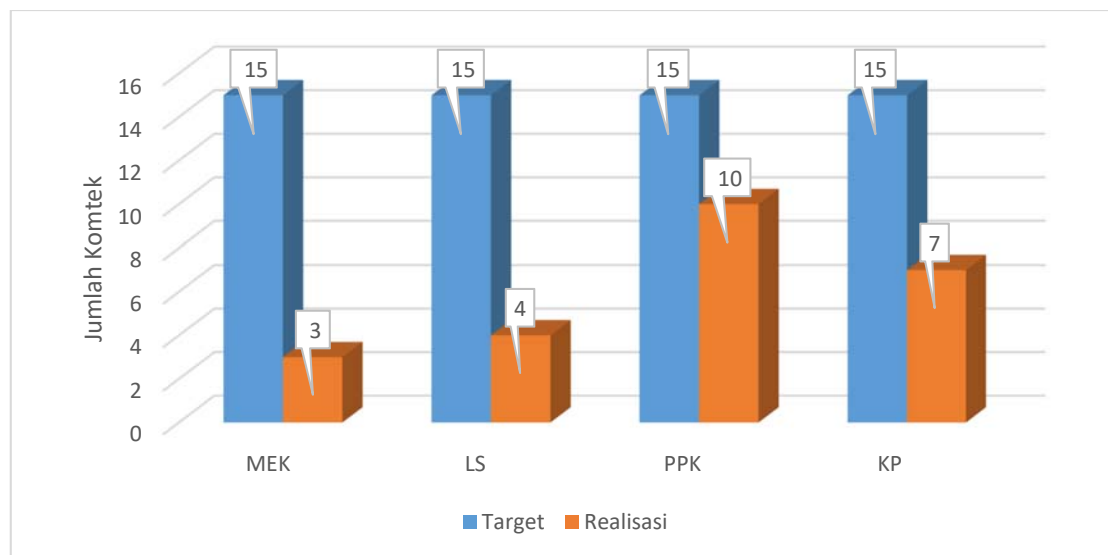
No	Scoring (%)	Komtek/Sub Komtek yang dievaluasi kinerjanya				PPS
		Bidang KP	Bidang PPK	Bidang MEK	Bidang LS	
1	> 70	0	1	0	0	1
2	60 - 70	1	1	0	1	3
3	50 - 60	3	3	1	0	7
4	40 - 50	3	5	2	3	13
5	30 - 40	0	1	3	2	6
6	20 - 30	3	2	3	6	14
7	10 - 20	9	13	15	12	49
8	1 - 10	2	14	8	7	31
9	< 1	2	7	9	3	21
Total		23	47	41	34	145

Dari 145 Komtek/Sub Komtek terdapat 24 Komtek/Sub Komtek yang mendapatkan scoring di atas passing grade di atas 40 % dari kriteria 4 penilaian pada tabel di atas. Dengan demikian capaian target tahun 2017 adalah 40 %. Hal ini terjadi karena di beberapa sekretariat Komtek, telah terjadi rotasi/mutasi pegawai, sehingga pengelolaan beberapa Komtek mengalami penurunan kinerja.

Capaian indikator kinerja jumlah Komtek/Subkomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja pada tahun 2017 tidak dapat

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

1. Adanya perbedaan pembobotan pada kriteria penilaian evkin antara tahun 2016 dengan 2017
2. Pada tahun 2016, Komtek/Subkomtek yang dianggap memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja adalah semua komtek yang mendapatkan scoring, sedangkan di tahun 2017 Komtek/Subkomtek yang dianggap memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja adalah Komtek/Subkomtek dengan scoring diatas 40%.



Gambar III.10 - Jumlah Komtek/Subkomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja

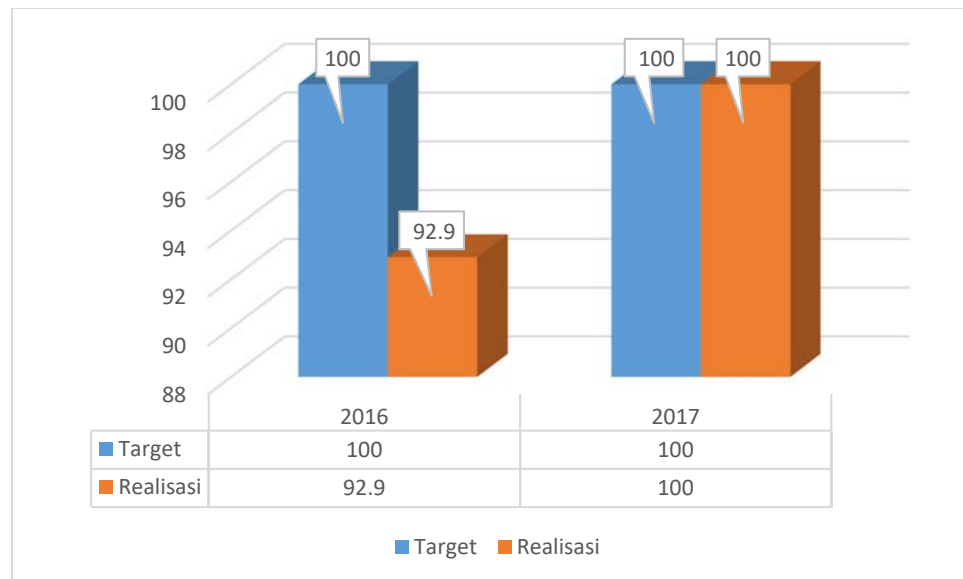
13. Indikator Kinerja: Persentase Komtek/Subkomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya

Evaluasi mengenai pemenuhan indikator kinerja Persentase Komtek/Subkomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya 2017 dilaksanakan pada 145 Komtek/Sub Komtek, melalui pelaksanaan kunjungan lapangan dilakukan terhadap 81 Komtek/SubKomtek, sementara sisanya 20 Komtek/SubKomtek melalui *self declare*.

Dengan demikian target persentase Komtek/ SubKomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya terpenuhi (100 %).

Untuk Komtek yang nilai scoringnya di bawah 10 % disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada pengajuan PNPS oleh Komtek pada tahun 2017, sehingga tidak ada kegiatan proses perumusan SNI.
2. Komtek yang baru dibentuk pada tahun 2017, sehingga belum ada SNI yang dihasilkan/proses perumusan SNI masih berjalan.
3. Adanya perubahan nomenklatur unit kerja di beberapa K/L, sehingga terjadi kevakuman pengelolaan sekretariat Komtek.
4. Kegiatan proses perumusan SNI telah berjalan sesuai tahapan namun pencapaian hingga tahap SNI belum dapat diselesaikan tepat waktu.



Gambar III.11 - Persentase Komtek/Subkomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya

Tabel III.19 - Capaian Kinerja Sasaran VII

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan / (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
14. Jumlah SNI yang dikaji ulang	100	656 SNI	656	-	-
15. Jumlah fasilitasi perumusan RSNI	100	100 SNI	100	122 SNI (122% dari target 100 SNI)	Penurunan
16. Jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI	30	51 SNI	170	-	-

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran fasilitasi program perumusan SNI terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu jumlah SNI yang dikaji ulang, jumlah fasilitasi perumusan RSNI dan jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 308,6%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 7.

14. Indikator Kinerja: Jumlah SNI yang dikaji ulang

Dalam program ini, PPS melakukan beberapa kegiatan berikut:

- 1) memberikan dukungan fasilitasi perumusan SNI melalui adopsi standar internasional yang menjadi sektor prioritas dengan metode republikasi-reprint;
- 2) memberikan dukungan ke Komtek untuk pemeliharaan SNI yang telah berusia lebih dari 5 tahun dengan melalui kegiatan kaji ulang SNI.

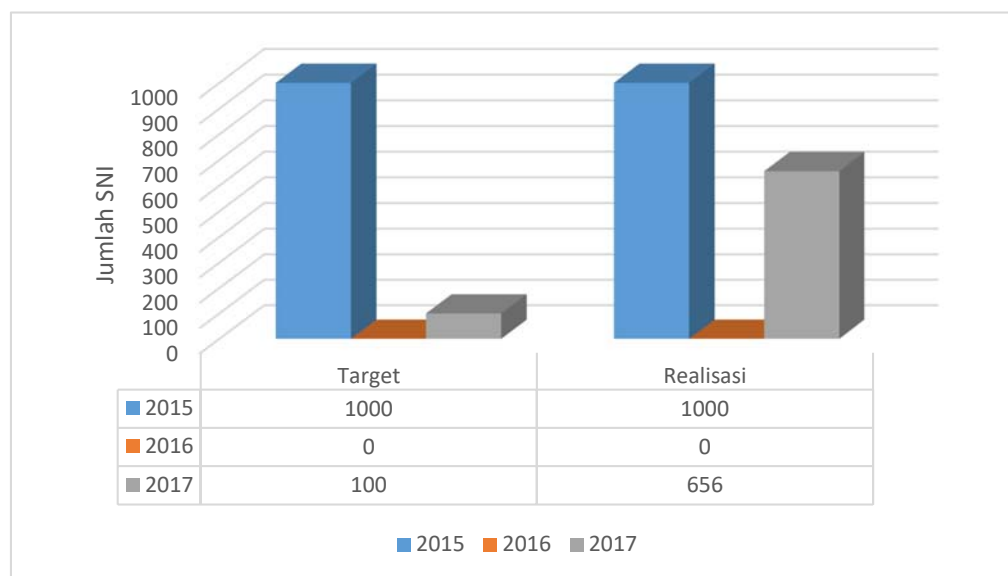
SNI perlu untuk dikaji ulang untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan, inovasi, dan teknologi; dan menilai kelayakan dan kekiniannya. Untuk menjaga keterkinian SNI, sesuai dengan praktek di internasional, kaji ulang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Dalam pelaksanaannya, perlu dilihat beberapa faktor untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi SNI tersebut, apakah SNI tersebut perlu diabolisi (jika tidak diperlukan lagi), tetap (jika masih sesuai), revisi (jika diperlukan perubahan yang cukup besar dalam substansinya), amandemen (jika hanya diperlukan sedikit perubahan substansi), serta ralat (jika terdapat kesalahan kecil misalnya kesalahan cetak). Beberapa faktor tersebut adalah: ketentuan pengembangan SNI yang ada, standar internasional yang tersedia, kesepakatan kerjasama regional (ASEAN) terkait harmonisasi standar, dan *national differences* apabila diperlukan.

Pada tahun tahun 2015, BSN melaksanakan kaji ulang SNI terhadap 1.000 SNI, namun pada tahun 2016 kegiatan kaji ulang ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran.

Pada tahun 2017, terdapat kaji ulang terhadap 656 SNI yang berasal dari beberapa komtek. Dengan demikian target kaji ulang 100 SNI pada tahun 2017 telah terpenuhi, bahkan terlampaui (656 %).



Gambar III.12 - Jumlah SNI yang dikaji ulang

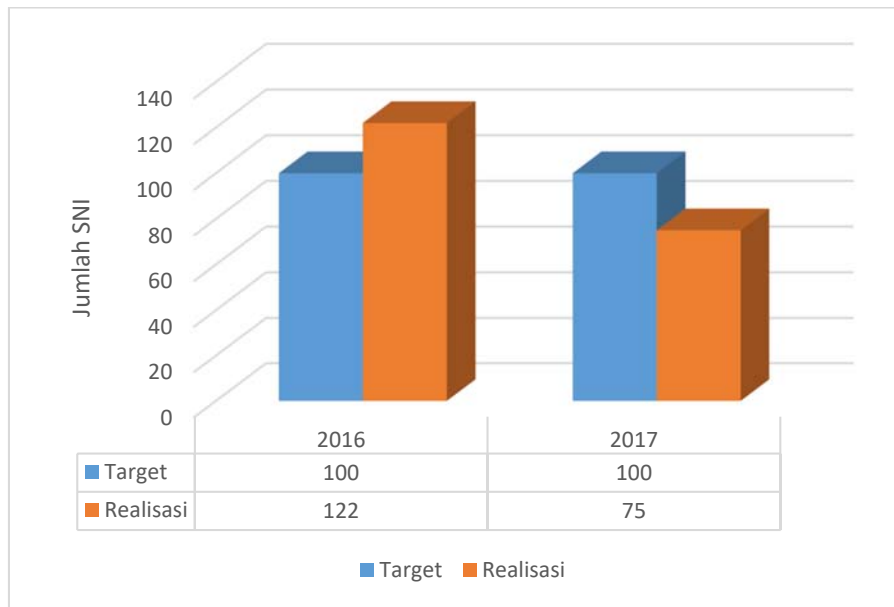
15. Indikator Kinerja: Jumlah fasilitasi perumusan RSNI

Pada tahun 2017, fasilitasi perumusan SNI dilakukan melalui adopsi standar internasional dan pengembangan sendiri. Adapun fasilitasi tersebut diberikan kepada 12 (dua belas) Komite Teknis dan 2 (dua) Subkomite teknis dengan total 75 judul (75 %) untuk dirumuskan menjadi SNI yang terdiri dari:

Tabel III.20 - Komtek/Sub Komtek yang difasilitasi tahun 2017

No	Komtek/Sub Komtek	Nama Komtek	Jumlah RSNI
1	65-05	Produk Perikanan	11
2	65-08	Produk Perikanan Nonkonsumsi	2
3	67-02-S1	Kemasan Pangan	2
4	67-04	Makanan dan Minuman	34
5	65-06	Produk Kimia dan Agro Kimia	1
6	71-01	Teknologi Kimia	1
7	83-01	Industri Karet dan Plastik	11
8	83-01-S2	Crumb rubber	10
9	25-01	Otomasi Industri	3
10	03-05	Lembaga Penilaian Kesesuaian	8
11	03-10	Manajemen Risiko	1
12	07-03	Nanoteknologi	4
13	17-04	Standar Dasar	5
14	37-01	Teknologi Grafika	7
Jumlah			100

Jumlah tersebut di atas berkurang bila dibandingkan dengan fasilitasi perumusan SNI melalui adopsi standar internasional dengan metode republikasi-reprint yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya.



Gambar III.13 - Jumlah fasilitasi perumusan RSNI

16. Indikator Kinerja: Jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI

Dalam rencana strategis PPS sebenarnya belum ada, namun sejak tahun 2016, dalam penetapan kinerja PPS untuk sasaran terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI, ditambahkan lagi satu indikator kinerja: jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan kebutuhan dari pemangku kepentingan dan sebagai upaya untuk mempermudah pengguna dalam memahami substansi SNI yang telah ada namun saat ini masih tersedia dalam bahasa Inggris, karena merupakan SNI hasil adopsi standar internasional dengan metode republikasi-reprint.

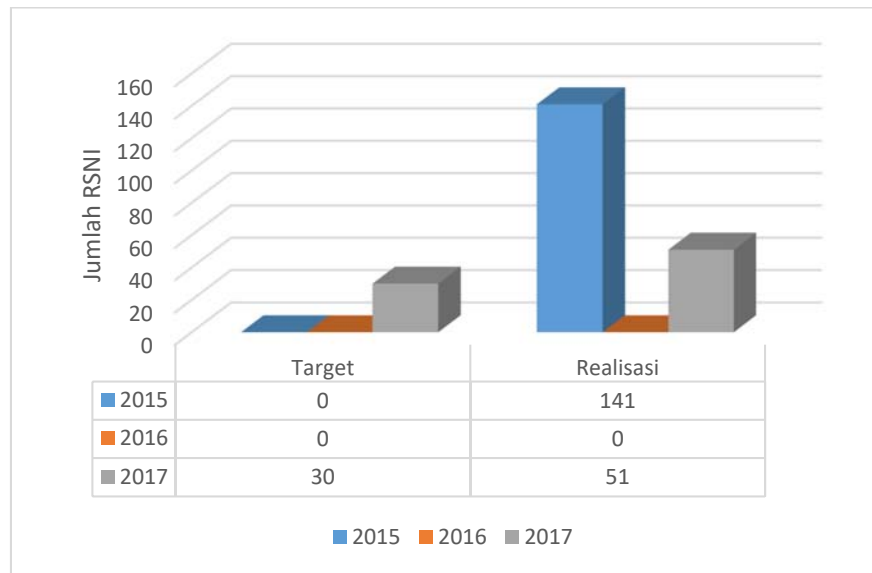
Untuk kegiatan ini tahun 2017 fasilitasi terjemahan ini diberikan kepada 13 (tiga belas) Komtek dengan jumlah 51 judul RSNI (170 %) dari target yang telah ditentukan 30 judul RSNI, dengan perincian sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel III.21 - Fasilitasi terjemahan kepada Komtek/Sub Komtek tahun 2017

No	Komtek/Sub Komtek	Nama Komtek	Jumlah SNI
1	11-03	Peralatan Kesehatan	6

No	Komtek/Sub Komtek	Nama Komtek	Jumlah SNI
2	11-05	Peralatan Kesehatan Berbasis IPTEK Nuklir	1
3	11-06	Kontrasepsi	3
4	11-08	Prasarana Laboratorium Biologi dan Kimia	1
5	11-13	Sterilisasi alkes	13
6	67-07	Analisis Sensori	8
7	67-08	Sistem Manajemen Keamanan Pangan	6
8	13-04	Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran	2
9	27-06	Konservasi Energi	1
10	43-02	Kendaraan jalan raya bertenaga listrik	2
11	79-02	Uji fisik dan mekanik kayu	5
12	91-01-S1	Sumber daya air	2
13	91-01-S4	Bahan, Sains, Struktur dan Konstruksi Bangunan	1
Jumlah			51

Pada tahun 2015 fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI belum masuk dalam rencana strategis PPS, namun PPS tetap memberikan fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI kepada komtek sebesar 141 judul RSNI. Sedangkan pada tahun 2016 fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI telah masuk dalam rencana strategis PPS, namun tidak dapat terlaksana karena adanya pemotongan anggaran.



Gambar III.14 - Jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSN

SASARAN 8

Terwujudnya pengembangan SNI yang koheren dengan perkembangan standar internasional

Tabel III.22 - Capaian Kinerja Sasaran 8

Indikator Kinerja	Capaian 2017		
	Target	Realiasi	Capaian %
17. Jumlah dokumen rekomendasi kertas posisi Indonesia terkait harmonisasi standar dalam forum kerjasama standardisasi regional/multilateral	40	49	122%
18. Persentase tanggapan Indonesia dalam forum pengembang standar internasional	80%	114%	142%
19. Persentase fasilitasi perumusan standar yang mengadopsi publikasi dari SDO	100%	100%	100%

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terwujudnya pengembangan SNI yang koheren dengan perkembangan standar internasional terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu jumlah dokumen rekomendasi kertas posisi Indonesia terkait harmonisasi standar dalam forum kerjasama standardisasi regional/multilateral, persentase tanggapan Indonesia dalam forum pengembang standar internasional dan persentase fasilitasi perumusan standar yang mengadopsi publikasi dari SDO. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 121%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 8.

17. Indikator Kinerja: jumlah dokumen rekomendasi kertas posisi Indonesia terkait harmonisasi standar dalam forum kerjasama standardisasi regional/multilateral

Pusat Perumusan Standar melakukan penyusunan kertas posisi dalam rangka mendukung partisipasi Indonesia dalam sidang luar negeri. Dari target 40 dokumen rekomendasi, capaian realisasi tahun 2017 adalah melebihi target yaitu 49 dokumen (122 %).



Gambar III.15 - Jumlah Rekomendasi kertas posisi Indonesia

18. Indikator Kinerja: persentase tanggapan Indonesia dalam forum pengembang standar internasional

Sebagai indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2017, tanggapan Indonesia dalam forum pengembang standar internasional sebelumnya dikelola oleh Pusat Kerjasama Standardisasi, dan terhitung mulai awal tahun 2017 diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Perumusan Standar. Pusat Perumusan Standar menetapkan indikator kinerja keberhasilan pada sasaran ini adalah 80 %, dengan pertimbangan karena merupakan tahap awal transisi pengelolaan tanggapan indonesia dalam forum pengembang standar internasional serta perlu didukung dengan sekretariat pengelola serta ketersediaan sumberdaya manusia yang ada.

Namun demikian, prosentase tanggapan atas nama indonesia dalam forum pengembang standar internasional di tahun 2017 sebesar 114% melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan ini karena disertai dengan strategi mirroring ruang lingkup Komtek dengan TC/SC yang relevan, sehingga pembahasan tanggapan dapat berjalan efektif dengan memanfaatkan pertemuan Komtek.



Gambar III.16 - Persentase Capaian Tanggapan Indonesia dalam forum Pengembang Standar Internasional

19. Indikator Kinerja: persentase fasilitasi perumusan standar yang mengadopsi publikasi dari SDO

Terkait pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja ini, pada tahun 2017, Pusat Perumusan Standar memberikan fasilitasi perumusan SNI berjumlah 107 (lima) judul, yang merupakan adopsi identik dari standar International Organization for Standardization (ISO). Dengan demikian, capaian fasilitasi perumusan standar yang mengadopsi publikasi dari SDO pada tahun 2017 sebesar 100 % telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, karena merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan mulai tahun 2017.

Tabel III.23 - Persentase fasilitasi Perumusan adopsi SDO PPS

Bidang	Jumlah fasilitasi adopsi SDO	Persentase fasilitasi adopsi SDO
MEK	3	100 %
PPK	5	100 %
LS	81	100 %
KP	18	100 %
Total	107	100 %

SASARAN 9

Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PPS yang profesional

Tabel III.24 - Capaian Kinerja Sasaran 9

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian		
20. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PPS yang meningkat kompetensinya	100%	100%	100%	-	
21. Realisasi anggaran PPS	≥ 95%	97,01%	102%	-	
22. Persentase pencapaian kinerja PPS	90%	77,27%	85%		

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian		
23. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	100%	100%	100%		
24. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	100%	100%	100%		
25. Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi unit PPS	75%	100%	133%		

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PPS yang profesional terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja yaitu persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PPS yang meningkat kompetensinya, realisasi anggaran PPS, persentase pencapaian kinerja PPS, persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal, persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal, dan persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi unit PPS. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 104,75%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 9.

20. Indikator Kinerja: persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PPS yang meningkat kompetensinya

Dalam rangka pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pusat Perumusan Standar (PPS) pada tahun 2017 melakukan pelatihan serta training peningkatan kompetensi ASN yang di koordinir masing-masing bidang di PPS dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel III.25 - Pelatihan dan training peningkatan kompetensi ASN di PPS

Bidang	Nama kegiatan	Peserta
PPK	Training pemahaman ISO 15189	11
	Training negotiation skills	11
	Training Public Speaking and Personal development	11

Bidang	Nama kegiatan	Peserta
	Workshop dan seminar pengayaan pengetahuan bagi pegawai BSN yang diselenggarakan oleh Biro HOH	11
LS	Workshop ISO 14001:2015	9
	Pelatihan ISO 17021-1:2015	9
	Magang	1
	Kunjungan ke industri	9
	Magang PPMB	12
	Magang IAPMO	12
	Magang PPMB	12
KP	Pelatihan Petugas Pengambilan Contoh	10
	Training pemahaman SNI ISO/IEC 17007:2010	9
	Training pemahaman SNI ISO/IEC 17020:2012	9
	Training pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2008	9
	Training pemahaman TBT-WTO	9
MEK	Pelatihan Petugas Pengambilan Contoh	12
	Pemahaman SDoC	12
	Magang Puskim	12
	Magang B4T	12
	Magang PPMB	12
	Magang IAPMO	12
	Magang PPMB	12

Pada tahun 2016 indikator ini tidak ditetapkan, namun untuk tahun 2017, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh personel PPS telah mendapatkan

pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya, dengan demikian target 100% persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PPS yang meningkat kompetensinya pada tahun 2017 yang ditetapkan oleh BSN, Pusat Perumusan Standar telah mampu memenuhi target sebesar 100%.

21. Indikator Kinerja: realisasi anggaran PPS

Sebagai bagian dari unit kerja di Kedeputusan PKS, maka pada tahun 2017 PPS mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 7.935.048.000, untuk membiayai 5 (lima) kegiatan utama. Dari pagu yang diberikan tersebut, dalam perjalanannya mengalami revisi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan karena adanya perubahan skala prioritas pengalokasian kebutuhan anggaran. Dari pagu anggaran yang diberikan, PPS mampu merealisasikan penyerapan anggaran melebihi target 95 % yaitu sebesar 97,01 %. Adapun rincian masing-masing kegiatan menurut output yang ada di PPS serta perbandingan realisasi anggaran dengan tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel III.26 - Realisasi Anggaran PPS tahun 2017 berdasarkan output anggaran

Output	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu	Persen Realisasi
051	Rp 1.770.065.000	Rp 1.672.217.313	Rp 97.847.687	94,47%
052	Rp 1.557.400.000	Rp 1.513.936.843	Rp 43.463.157	97,21%
053	Rp 1.566.094.000	Rp 1.525.664.392	Rp 40.429.608	97,42%
054	Rp 1.527.095.000	Rp 1.491.070.694	Rp 36.024.306	97,64%
055	Rp 1.514.394.000	Rp 1.495.170.151	Rp 19.223.849	98,73%
Total	Rp 7.935.048.000	Rp 7.698.059.393	Rp 236.988.607	97,01%
Keterangan:				
051 Menyusun Rekomendasi Kebijakan Perumusan Standar Nasional Inonesia				
052 Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi				
053 Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Lingkungan dan Serbaneka				
054 Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Kimia dan Pertambangan				
055 Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan				

Tabel III.27 - Realisasi Anggaran PPS tahun 2017 berdasarkan komponen mata anggaran

Komponen	Pagu	Realisasi	Realisasi (%)
521211	Rp 1.193.733.000	Rp 1.188.345.000	99,55 %
521213	Rp 118.000.000	Rp 110.200.000	93,39 %
521219	Rp 960.916.000	Rp 955.000.326	99,38 %
521811	Rp 207.178.000	Rp 206.903.772	99,87 %
522141	Rp 10.250.000	Rp 9.525.000	92,93 %
522151	Rp 1.895.200.000	Rp 1.876.500.000	99,01 %
524111	Rp 906.647.000	Rp 802.784.817	88,54 %
524113	Rp 597.950.000	Rp 527.550.000	88,23 %
524114	Rp 1.189.090.000	Rp 1.187.428.988	99,86 %
524119	Rp 475.935.000	Rp 462.103.967	97,09 %
524219	Rp 380.149.000	Rp 371.717.523	97,78 %
Total	Rp 7.935.048.000	Rp 7.698.059.393	97,01 %

Keterangan:

521211 Belanja Bahan	524111 Belanja Perjalanan Biasa
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
522141 Belanja Sewa	524219 Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri
522151 Belanja Jasa Profesi	

Tabel III.28 - Perbandingan Realisasi Anggaran PPS di tahun 2016 dan 2017

Tahun	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	Persen Realisasi
2016	Rp 5.183.795.000	Rp 5.119.981.129	Rp 63.813.871	98,77%
2017	Rp 7.935.048.000	Rp 7.698.059.393	Rp 236.988.607	97,01%

22. Indikator Kinerja: persentase pencapaian kinerja PPS

Pada tahun 2017, pencapaian kinerja Pusat Perumusan Standar sebagai berikut:

Tabel III.29 - Pencapaian Kinerja PPS tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan Jumlah	Target 2017	Realisasi	Capaian	Status
1	Rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	rekomendasi	6	6	100%	Tercapai
2	RSNI yang diusulkan untuk ditetapkan dalam memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri	SNI	500	539	108%	Tercapai
3	Rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	rekomendasi	36	35	97%	Tidak Tercapai
4	Rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)	rekomendasi	500	1043	209%	Tercapai
5	Rekomendasi terhadap rancangan PERKA BSN terkait pengembangan SNI	rekomendasi	2	6	300%	Tercapai
6	SNI yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan PERKA BSN	SNI	500	555	111%	Tercapai
7	Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN	Komite Teknis	36	34	94%	Tidak Tercapai
8	Sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	orang	150	1061	707%	Tercapai
9	Komtek/SubKomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja	Komtek/ Subkomtek	60	35	58%	Tidak Tercapai
10	Komtek/ SubKomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya	Persentase	100%	87,41%	87,41%	Tidak Tercapai
11	SNI yang dikaji ulang	SNI	100	656	656%	Tercapai
12	Fasilitasi perumusan RSNI	RSNI	100	100	100%	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan Jumlah	Target 2017	Realisasi	Capaian	Status
13	Fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI	Dokumen	30	51	170%	Tercapai
14	Dokumen rekomendasi kertas posisi Indonesia terkait harmonisasi standar dalam forum kerjasama standardisasi regional/multilateral	kertas posisi	40	48	120%	Tercapai
15	Tanggapan Indonesia dalam forum pengembang standar internasional	Persentase	80%	85%	106%	Tercapai
16	Fasilitasi perumusan standar yang mengadopsi publikasi dari SDO	Persentase	100%	100%	100%	Tercapai
17	Aparatur Sipil Negara (ASN) unit kerja eselon III yang meningkat kompetensinya	Persentase	100%	100%	100%	Tercapai
18	Realisasi anggaran	Persentase	95%	97,75%	103%	Tercapai
19	Pencapaian kinerja Pusat Perumusan Standar	Persentase	90%	84,88%	77,27%	Tidak Tercapai
20	Tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	Persentase	100%	100%	100%	Tercapai
21	Tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	Persentase	100%	100%	100%	Tercapai
22	Implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi unit eselon III	Persentase	75%	81,25%	108%	Tercapai

Tabel III.30 - Persentase Pencapaian Kinerja Pusat Perumusan Standar

Pencapaian kinerja Pusat Perumusan Standar	Tahun 2017	Persentase
Indikator kinerja yang tercapai	17	77,27
Indikator kinerja yang tidak tercapai	5	22,73
Total	22	100 %

Dari kedua tabel diatas, Pusat Perumusan Standar berhasil mencapai target 17 indikator kinerja dari 22 target indikator kinerja yang ditetapkan, sehingga indikator kinerja yang tercapai adalah 77,27% atau di bawah target yang diberikan pada tahun 2017 sebesar 90 %. Indikator kinerja yang tidak tercapai sebesar 22,73%, yaitu untuk indikator sebagai berikut:

1. Jumlah Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN, tidak mencapai target karena sekretariat di K/L (luar PPS) tidak bersedia melepaskan pengelolaannya. Salah satu contohnya yaitu Komtek 83-01, Industri Karet dan Plastik. Sekretariat Komtek berada di Pusat Standardisasi Industri, Kementerian Perindustrian yang masih memiliki Tusi di bidang standardisasi;
2. Jumlah Komtek/SubKomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja, tidak mencapai target karena ada Komtek yang baru dan ada beberapa yang tidak terlalu aktif dalam proses perumusan standar;
3. Persentase Komtek/ SubKomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya, tidak mencapai target karena terdapat Komtek yang baru dibentuk pada tahun 2017 dan satu Komtek yang sedang dalam proses pengalihan sekretariat, sehingga belum memungkinkan untuk dilakukan kunjungan ke sekretariat terkait dan penilaian pengelolaan sekretariat Komtek-komtek tersebut.
4. Jumlah Rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI, hanya terdapat 35 rekomendasi dari target 36 rekomendasi yang ditetapkan karena pada tahun 2017 beberapa komtek dan subkomtek tidak mengalami perubahan sekretariat, ruang lingkup, maupun keanggotaan.
5. Persentase pencapaian IKU unit kerja eselon III, tidak memenuhi target karena ada 5 (lima) Indikator Kinerja yang tidak terpenuhi target realisasinya dari 21 Indikator Kinerja.

23. Indikator Kinerja: persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal

Tahun 2017 pencapaian sasaran tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal di Pusat Perumusan Standar dari indikator kinerja yang ditetapkan mencapai target 100%. Berbeda dengan tahun 2016 karena indikator ini tidak

ditetapkan. Adapun rincian masing-masing kegiatan tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal yang menjadi target pada tahun 2017 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.31 – Tindak lanjut pengawasan eksternal Pusat Perumusan Standar

No	Pengawasan Eksternal	Tindak lanjut
1	Laporan temuan BPK tahun 2016	1 laporan jawaban temuan BPK
2	Surveilence audit SMM dari Sucofindo	1 laporan jawaban hasil audit
3	Laporan RB dari Kemenpan	1 laporan jawaban hasil audit
4	Laporan SPIP dari BPKP	1 laporan jawaban hasil audit

24. Indikator Kinerja: persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal

Tahun 2017 pencapaian sasaran tindak lanjut atas hasil pengawasan internal di Pusat Perumusan Standar dari indikator kinerja yang ditetapkan mencapai target 100%. Berbeda dengan tahun 2016 karena indikator ini tidak ditetapkan. Adapun rincian masing-masing kegiatan tindak lanjut atas hasil pengawasan internal yang menjadi target pada tahun 2017 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.32 – Tindak lanjut pengawasan internal

No	Pengawasan Internal	Tindak lanjut
1	Laporan temuan Inspektorat semester 1 dan 2 tahun 2017	1 laporan jawaban temuan Inpektorat BSN
2	Audit internal SMM dari auditor BSN	1 laporan jawaban hasil audit
3	Laporan RB dari Tim internal BSN	1 laporan jawaban hasil audit
4	Laporan SPIP dari Inspektorat BSN	1 laporan jawaban hasil audit

25. Indikator Indikator Kinerja: persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi unit PPS

Untuk target pencapaian sasaran implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi unit eselon II, yang merupakan indikator kinerja baru di tahun 2017 bidang

Pertanian, Pangan dan Kesehatan telah melaksanakan secara penuh semua yang ditetapkan oleh manajemen BSN dalam rangka Program Reformasi Birokrasi BSN. Pencapaian sasaran implementasi RB BSN di Pusat Perumusan Standar dari indikator kinerja yang ditetapkan mencapai target 100%. Berbeda dengan tahun 2016 karena indikator ini tidak ditetapkan.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember 2016, pagu anggaran Kepala Pusat Perumusan Standar adalah sebesar Rp 7.935.048.000 dan realisasi anggaran Kepala Pusat Perumusan Standar TA 2017 adalah sebesar Rp 7.698.059.393 sebesar 97,01%. Pagu dan realisasi anggaran Kepala Pusat Perumusan Standar TA 2017 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel III.33 - Pagu dan Realisasi Anggaran
Kepala Pusat Perumusan Standar TA 2017**

Dalam rupiah

Kode	Output/Komponen	2017		%
		Pagu	Realisasi	
051	Menyusun Rekomendasi Kebijakan Perumusan Standar Nasional Inonesia	1,770,065,000	1,672,217,313	94.47%
052	Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Mekanika, Elektronika Dan Konstruksi	1,557,400,000	1,513,936,843	97.21%
053	Menyusun Standar Nasional Indonesia Bidang Lingkungan Dan Serbaneka	1,566,094,000	1,525,664,392	97.42%
054	Menyusun Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia Bidang Kimia Dan Pertambangan	1,527,095,000	1,491,070,694	97.64%
055	Menyusun Standar Nasional Indonesia Bidang Pertanian, Pangan Dan Kesehatan	1,514,394,000	1,495,170,151	98.73%
	Jumlah	7,935,048,000	7,698,059,393	97.01%

Laporan Kinerja Kepala Pusat Perumusan Standar Tahun 2017 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Kepala Pusat Perumusan Standar Tahun 2017 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Pusat Perumusan Standar

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Kepala Pusat Perumusan Standar Tahun 2017, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Kepala Pusat Perumusan Standar Tahun 2017, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja tahun 2017.

Perbandingan antara target dan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel IV.1 di bawah ini.

Tabel IV.1 - Pencapaian Kinerja Kepala Pusat Perumusan Standar Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realiasi	Capaian
Customer Perspectives					
1) Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1. Pertumbuhan SNI yang siap diterapkan oleh industri / organisasi	SNI	300	349	N/A
	2. Pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk unggulan nasional	SNI	100	76	N/A
	3. Pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk yang	SNI	100	114	N/A

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realiasi	Capaian
	beredar di pasar retail				
Internal Process Perspectives					
2) Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4. Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	Rekomendasi	6	6	100 %
	5. Jumlah SNI yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan regulasi, produk unggulan nasional, produk retail dalam negeri.	SNI	500	539	107,8%
3) Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional	6. Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	Rekomendasi	36	35	97,22 %
	7. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)	Rekomendasi	500	1043	208,6%
	8. Jumlah rancangan PERKA BSN terkait pengembangan SNI	rancangan	2	6	300%
4) Terwujudnya SNI yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan PERKA BSN	9. Jumlah SNI yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan PERKA BSN	SNI	500	539	107,8 %
	10. Jumlah sekretariat Komtek Perumusan SNI yang dikelola BSN	Sekretariat	36	34	94,44%
5) Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar	11. Jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	Orang	600	1061	176,8%

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realiasi	Capaian
6) Meningkatnya kualitas Komtek/Subkomtek perumusan standar	12. Jumlah Komtek/Subkomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja	Komtek / Subkomtek	60	24	40%
	13. Persentase Komtek/Subkomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya	%	100%	100%	100%
7) Terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI	14. Jumlah SNI yang dikaji ulang	SNI	100	656	656%
	15. Jumlah fasilitasi perumusan RSNI	RSNI	100	100	100%
	16. Jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI	SNI	30	51	170%
8) Terwujudnya pengembangan SNI yang koheren dengan perkembangan standar internasional	17. Jumlah dokumen rekomendasi kertas posisi Indonesia terkait harmonisasi standar dalam forum kerjasama standardisasi regional/multilateral	Dokumen	40	49	122%
	18. Persentase tanggapan Indonesia dalam forum pengembang standar internasional	%	80	114	142%
	19. Persentase fasilitasi perumusan standar yang mengadopsi publikasi dari SDO	%	100	100	100%
Learning and Growth Perspectives					
9) Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran,	20. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PPS yang meningkat kompetensinya	%	100%	100%	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realiasi	Capaian
sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PPS yang profesional.	21. Realisasi anggaran PPS	%	≥ 95%	97,01%	102%
	22. Persentase pencapaian kinerja PPS	%	90%	77,27%	85%
	23. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	%	100%	100%	100%
	24. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	%	100%	100%	100%
	25. Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi unit PPS	%	75%	100%	133%

Meskipun demikian, sebenarnya masih ada beberapa sub kegiatan yang masih perlu diperhatikan dan dilakukan evaluasi kembali secara matang untuk maksud perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang karena capaiannya yang masih dibawah target, yaitu:

- (1) Pencapaian target jumlah sekretariat Komtek Perumusan SNI yang dikelola oleh BSN masih belum tercapai (94%), sehingga ke depan perlu adanya koordinasi dan pendekatan kepada instansi pengelola sekretariat Komtek yang berpotensi untuk dialihkan ke BSN;
- (2) Pencapaian target 15 Komtek/Sub Komtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja pada tahun 2017 belum terpenuhi (40%) sehingga perlu penguatan koordinasi dan pembinaan dengan Sekretariat pengelola Komtek/Sub Komtek;

Memperhatikan realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan kepada unit PPS tahun 2017, dan kendala serta peluang perbaikan yang masih terbuka lebar, maka untuk maksud perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

- (1). Penguatan pembinaan dan pendampingan kepada Sekretariat Komtek/Sub Komtek dalam memahami ketentuan yang terdapat dalam

PSN pengembangan SNI yang harus dipenuhi, misalnya melalui audiensi, workshop in-house ke sekretariat Komtek/Sub Komtek, penguatan reminder, koordinasi intensif dan penyelenggaraan workshop pengelolaan Komtek sebagai media *benchmarking* antar sekretariat Komtek.

- (2). Penguatan pengaturan kelembagaan antar K/L terkait pengelolaan kegiatan standardisasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No.20/2014, agar terdapat unit kerja di K/L yang mempunyai tupoksi spesifik terkait standardisasi, termasuk salah satunya tanggung jawab untuk pengelolaan Sekretariat Komtek/Sub Komtek yang ada di lingkup K/L tersebut.
- (3). Penguatan perencanaan kegiatan dan penetapan target yang realistis, untuk menghindari target yang tidak mungkin dicapai, misalnya keadaan dimana pada saat evaluasi kinerja dilakukan masih ada Komtek/Sub Komtek yang baru saja terbentuk (kurang dari satu tahun) dan belum ada aktifitas perumusan SNI, sehingga tidak dapat dilakukan evaluasi kinerja.
- (4). Penguatan perencanaan pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan agar target realisasi anggaran dapat ditingkatkan dari capaian sebelumnya.

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KEPALA PUSAT PERUMUSAN STANDAR



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Supriyatna
Jabatan : Kepala Pusat Perumusan Standar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Puji Winarni
Jabatan : Plt. Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama
Standardisasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Puji Winarni

Jakarta, Februari 2017
Pihak Pertama

I Nyoman Supriyatna



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PUSAT PERUMUSAN STANDAR
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Customer Perspectives		
1 Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1 Pertumbuhan SNI yang siap diterapkan oleh industri/organisasi	300 SNI
	2 Pertumbuhan Jumlah SNI yang siap mendukung produk unggulan nasional	100 SNI
	3 Pertumbuhan jumlah SNI yang siap mendukung produk yang beredar di pasar retail	100 SNI
Internal Process Perspectives		
2 Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4 Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	6 rekomendasi
	5 Jumlah SNI yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan regulasi; produk unggulan nasional; produk retail dalam negeri	500 SNI
3 Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional	6 Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI	36 rekomendasi
	7 Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)	500 rekomendasi
	8 Jumlah rancangan PERKA BSN terkait pengembangan SNI	2 rancangan
4 Terwujudnya SNI yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan PERKA BSN	9 Jumlah SNI yang ditetapkan telah memenuhi ketentuan PERKA BSN	500 SNI
	10 Jumlah Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN	36 sekretariat Komtek



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5 Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar	11 Jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya	600 orang
6 Meningkatnya kualitas Komtek/ Subkomtek perumusan standar	12 Jumlah Komtek/SubKomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja	60 Komtek/ SubKomtek
	13 Persentase Komtek/ SubKomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya	100 %
7 Terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI	14 Jumlah SNI yang dikaji ulang	100 kaji ulang
	15 Jumlah fasilitasi perumusan RSNI	100 RSNI
	16 Jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI	30 RSNI
8 Terwujudnya pengembangan SNI yang koheren dengan perkembangan standar internasional	17 Jumlah dokumen rekomendasi kertas posisi Indonesia terkait harmonisasi standar dalam forum kerjasama standardisasi regional/multilateral	40 rekomendasi posisi Indonesia
	18 Persentase tanggapan Indonesia dalam forum pengembang standar internasional	80 %
	19 Persentase fasilitasi perumusan standar yang mengadopsi publikasi dari SDO	100 %
Learning and Growth Perspectives		
9 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PPS yang profesional	20 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PPS yang meningkat kompetensinya	100 %
	21 Realisasi anggaran PPS	≥95 %
	22 Persentase pencapaian kinerja PPS	90 %
	23 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	100 %



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	24 Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	100 %
	25 Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi PPS	75 %

Kegiatan

1 Perumusan Standar

Anggaran (Rp.)

10.350.000.000

Pihak Kedua

Puji Winarni

Jakarta, Februari 2017

Pihak Pertama

I Nyoman Supriatna